

LAPORAN WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

**“ PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ
KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN
POKOK - POKOK PIKIRAN DPRD ”**

Tanggal, 02 s.d 04 Februari 2024
Hotel “Grand Karlita ” Purwokerto - Banyumas

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Tuntunan-Nya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI telah menyelesaikan penyusunan laporan kegiatan Workshop “**Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD**”, yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi bagi pihak - pihak yang berkepentingan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Workshop yang akan datang.

Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan Workshop ini adalah memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini, membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat, meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD dan mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.

Kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan Workshop ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga upaya, jerih payah dan pengabdian yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Terima kasih juga kami ucapkan kepada Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa tengah yang telah telah memandu dan mengarahkan kami agar dapat melaksanakan kegiatan Workshop secara berkualitas, optimal dan sesuai dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2018. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Banjarnegara yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk memfasilitasi pelaksanaan Workshop. Masukan, saran, serta kritik konstruktif sangat dibutuhkan dalam perbaikan untuk pelaksanaan Workshop di kemudian hari semoga kegiatan ini bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai wakil rakyat.

Semarang, Februari 2024
Kepala LPPM,



Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar -----	I
Daftar Isi -----	II
BAB I PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Maksud dan Tujuan -----	4
C. Dasar Hukum -----	4
BAB II RENCANA KEGIATAN-----	6
A. Organisasi Penyelenggara -----	6
B. Tema Kegiatan -----	6
C. Waktu dan Tempat -----	6
D. Pembiayaan -----	6
E. Materi -----	7
F. Narasumber -----	7
G. Moderator -----	7
H. Strategi Pembelajaran -----	8
BAB III REALISASI KEGIATAN -----	9
A. Susunan Acara Pembukaan -----	9
B. Susunan Acara Penutupan -----	10
C. Peserta -----	10

D. Tindak Lanjut	11
E. Sarana dan Prasarana	11
BAB IV PENUTUP	12
Lampiran – lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) adalah laporan berupa informasi penyelenggara pemerintahan selama satu tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Pencapaian sasaran pembangunan dan kinerja pelaksanaan program/kegiatan menjadi hal yang harus dipertanggungjawabkan untuk menegaskan komitmen terhadap setiap penggunaan uang Negara/Daerah harus berorientasi kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Ruang lingkup Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) meliputi hasil kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang terdiri atas : capaian pelaksanaan program dan kegiatan beserta permasalahan dan upaya penyelesaiannya; kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Sebagai upaya meningkatkan kapasitas DPRD dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya secara optimal dan terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (good government governance), maka diperlukan pemahaman bagi para anggota DPRD terhadap regulasi dan isu-isu strategis pemerintah daerah terkait LKPJ yang disampaikan oleh Kepala Daerah. Dengan demikian, pembahasan LKPJ dapat dilakukan oleh para anggota DPRD secara optimal.

Guna melaksanakan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, salah satu tahapan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah Penelaahan pokok-pokok Pikiran DPRD.

Pokok pikiran DPRD merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang kemudian dimasukkan ke dalam SIPD dalam bentuk Program dan Kegiatan.

Dokumen pokok-pokok Pikiran DPRD yang awalnya merupakan dokumen teknis, kemudian melalui pembahasan di dewan berubah menjadi dokumen politis sebagai wujud akumulasi, agregasi dan representasi masyarakat untuk bahan penyusunan RKPD.

Penyusunan Dokumen pokok-pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan disusunnya pokok-pokok Pikiran DPRD yaitu memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen awal draf RKPD. Lalu, memudahkan dan mengefektifkan penyusunan dokumen RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, dan RAPBD.

Selain itu, pokok-pokok Pikiran DPRD juga mengarahkan dan memfokuskan upaya pencapaian Visi dan Misi melalui perencanaan dan penganggaran APBD, serta mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD mewujudkan aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD.

Terakhir dan yang krusial, pokok-pokok Pikiran DPRD juga mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Penyusunan pokok-pokok Pikiran DPRD, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Daerah dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil-hasil studi banding/studi tiru DPRD, tindak lanjut hasil temuan BPK, masukan kelompok pakar, tenaga ahli fraksi dan lain-lain.

Dengan demikian, dalam rangka meningkatkan pemahaman Pimpinan dan Anggota DPRD tentang tugas, fungsi, dan kewenangannya, kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI akan menyelenggarakan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan tema : **“Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”**.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diadakannya kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran serta peningkatan kapasitas dan kompetensi bagi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota mengenai pembaharuan tugas anggota legislatif yang berlaku saat ini.
2. Membekali peserta agar memiliki kompetensi dan kemampuan profesi sebagai anggota legislatif yang merupakan wakil rakyat.
3. Meningkatkan wawasan, pengetahuan, kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas DPRD.
4. Mempersiapkan peserta dalam memposisikan dirinya di kehidupan berpolitik sesuai trias politika, *new public management* dan *good governance*.
5. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta keterampilan kepada Anggota DPRD dan Anggota agar dapat meningkatnya kinerja yang profesional dan berkompeten di lingkungan DPRD dan pemerintahan Daerah.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi kegiatan Workshop ini adalah sebagai berikut :

1. Undang - Undang No. 23 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Permendagri No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Surat Ijin No. 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 yang dikeluarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI tentang Penyelenggara Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
6. Surat Edaran Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No.895.3/6208/BPSDM Tanggal 31 Agustus 2021 tentang Pelaksanaan Pendalaman Tugas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB II RENCANA KEGIATAN

A. Organisasi Penyelenggara

Nama organisasi penyelenggara adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang.

B. Tema Kegiatan

Tema Workshop **"Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD"**

C. Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat pelaksanaan Workshop "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD", dilaksanakan pada hari Jum'at s.d Minggu, Tanggal 02 s.d 04 Februari 2024 di Hotel "Grand Karlita" Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141.

D. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan Workshop "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD" dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dengan nominal setiap peserta adalah sebesar @ Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

E. Materi

Materi Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah sebagai berikut:

1. Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah.
2. Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
3. ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi
4. Focus Group Discussion (FGD)

F. Narasumber

Narasumber Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah sebagai berikut :

1. Drs. Ismail Amir, M.Si (Dewan Nasional FITRA)
2. Widayanto Bintang (Sekolah Movera Public Speaking School)

G. Moderator

Moderator Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”, adalah Risahlan Rafsanjani, SH., MH.

H. Strategi Pembelajaran

Strategi pembelajaran yang digunakan adalah cara pembelajaran orang dewasa (metode andragogi). Kegiatan Workshop dilaksanakan dengan penyampaian materi oleh narasumber secara terstruktur sesuai dengan topik yang disampaikan. Di akhir sesi dilanjutkan dengan tanya jawab dan diskusi sehingga penyajian menjadi lebih dinamis, menarik dan interaktif sehingga tidak membosankan.

BAB III REALISASI KEGIATAN

A. Susunan Acara Pembukaan

Kegiatan Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” dibuka pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024 dan diikuti oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara sebanyak 47 orang.

Adapun rangkaian acara pembukaan adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Mengheningkan Cipta
4. Sambutan - sambutan :
 - Pertama : Sambutan Rektor Universitas AKI
(Ibu Dr. Tri Purwani, SE., MM.)
 - Kedua : Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara
(Bapak Ismawan Setya Handoko, SE)
5. Pembukaan Acara Workshop secara simbolis
6. Pembacaan Do'a

B. Susunan Acara Penutupan

Kegiatan Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” ditutup pada hari Minggu tanggal 04 Februari 2024, dengan rangkaian susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan

2. Sambutan-sambutan

Pertama : LPPM Universitas AKI, diwakilkan kepada Moderator

(Bapak Risahlan Rafsanzani, SH., MH)

Kedua : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara

(Bapak H. Edy Purwanto)

3. Penutupan Acara Workshop Secara Simbolis

4. Foto Bersama

5. Penutup

C. Peserta

Peserta yang mengikuti Workshop “ Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara berjumlah 47 orang. (Daftar hadir terlampir)

D. Tindak Lanjut

Setelah menyelesaikan kegiatan Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”, para peserta dibekali oleh seluruh makalah dan materi yang telah disampaikan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan rencana tindak lanjut (action plan). Rencana tindak lanjut tersebut berupa mentransfer pengetahuan yang diperoleh selama Workshop kepada seluruh peserta yang terkait.

E. Sarana dan Prasarana

Kegiatan Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”, diselenggarakan di Hotel Grand Karlita Purwokerto, dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Akomodasi

Akomodasi peserta berupa tempat penginapan dengan hotel berbintang yang nyaman bagi pelaksanaan Workshop dan konsumsi yang baik bagi peserta.

2. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan adalah laptop, LCD *projector*, dan materi dalam bentuk digital yang dibagikan kepada peserta.

3. Seminar Kit

Peserta Workshop mendapatkan fasilitas Seminar Kit.

BAB IV PENUTUP

Demikianlah keseluruhan rangkaian kegiatan Workshop “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”. Semoga kegiatan tersebut bermanfaat bagi para Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang nantinya menjadi gerbong penggerak dinamika pemerintahan yang konstruktif. Melalui kegiatan ini, semoga peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya mampu mencapai keberhasilan serta mendapat apresiasi positif dari masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dan keadilan.



SURAT PENAWARAN



UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lpmm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Nomor : 001/BT/LPPM/UNAKI/I/2024
Lampiran : Proposal Kegiatan
Perihal : **Penawaran Workshop**

Kepada Yth.

Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara

Provinsi Jawa Tengah

Dengan hormat,

Salam sejahtera kami ucapkan, Semoga Bapak/Ibu beserta keluarga selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan.

Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD adalah hal mutlak yang harus senantiasa dilaksanakan. Begitu pula dengan berbagai regulasi yang menjadi acuan haruslah senantiasa disosialisasikan agar dipahami dan menjadi acuan dalam setiap tugas, peran, dan fungsi bagi setiap Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Atas dasar pemikiran tersebut, maka bersama surat ini kami Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI berdasarkan surat izin dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri RI No. 895.3/6164/BPSDM Tahun 2020 bermaksud menawarkan kerjasama Penyelenggaraan Pendalaman Tugas, Kegiatan Workshop bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan tema : **“Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD”**.

Adapun kegiatan akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d Minggu
Tanggal : 02 – 04 Februari 2024
Tempat : Hotel **“Grand Karlita”** Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto - Banyumas 53141
Kontribusi : 6.000.000,-/Peserta

Demikian surat penawaran ini kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, dengan harapan dapat terjalin kerjasama yang baik dan bermanfaat. Kemudian atas perhatiannya dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Semarang, 17 Januari 2024

Kepala LPPM,



Ana Wahyuni, S.Si., M.Kom.
NIDN. 0601067503

Tembusan :

1. Rektor Universitas AKI
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Bajarnegara
3. Arsip



JADWAL KEGIATAN

JADWAL KEGIATAN WOKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

Tanggal 02 s.d. 04 Februari 2024 | Hotel "Grand Karlita" Purwokerto

Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
13.00 - 19.00	Chek - In & Registrasi Peserta	Pantia
19.00 - 22.00	Makan Malam	
22.00 -	Istirahat	

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
06.00 - 08.00	Makan Pagi	
08.00 - 08.15	UPACARA PEMBUKAAN : <ul style="list-style-type: none">- Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya- Sambutan Rektor Universitas AKI- Sambutan Ketua DPRD Kab. Banjarnegara- Do'a- Penutup- Penyerahan Cenderamata + Foto Bersama	
08.15 - 11.45	Materi 1 : Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah	Drs. Ismail Amir, M.Si (Dewan Nasional FITRA)
11.45 - 13.30	Istirahat - Makan Siang	
13.30 - 18.00	Materi 2 : Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD	Drs. Ismail Amir, M.Si (Dewan Nasional FITRA)
17.45 - 19.00	Istirahat - Makan Malam	
19.00 - 22.45	Materi 3 : ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi	Widayanto Bintang (Sekolah Movera Public Speaking School)

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Februari 2024

Waktu	Materi/Kegiatan	Narasumber/Fasilitator
08.00 - 08.15	Makan Pagi	
08.15 - 11.45	Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD) PENUTUPAN	LPPM UNAKI
11.45 - 12.00	Persiapan Check Out	
12.00 -	Check - Out	

*Catatan : Jadwal kegiatan dapat berubah secara fleksibel sesuai situasi dan kondisi yang tak terduga



AKREDITASI UNIVERSITAS



BAN-PT

Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 96/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019, menyatakan bahwa

Universitas Aki, Kota Semarang

Terakreditasi dengan peringkat

Terakreditasi B

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal 19 - Maret - 2019 sampai dengan 19 - Maret - 2024*



Jakarta, 19 - Maret - 2019

Prof. T. Basaruddin
Direktur Dewan Eksekutif



SURAT PENUNJUKAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Pemuda Nomor 64 Telp (0286) 592634 Banjarnegara 53414
<http://www.dprd.banjarnegarakab.go.id> Email : setwan@banjarnegarakab.go.id

Banjarnegara, 18 Januari 2024

Nomor : 100.2.5/31/SETWAN/2024
Lampiran : -
Perihal : Penunjukkan Penyelenggara
Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD.

Kepada.
Yth. Kepala LPPM UNAKI Semarang
Di-
SEMARANG

Menindaklanjuti Disposisi Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara pada Nota Dinas tanggal 18 Januari 2024 dan surat Saudara nomor 001/BT/LPPM/UNAKI/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Surat Penawaran Kerjasama WorkShop DPRD Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jum'at s.d Minggu
Tanggal : 2 s.d 4 Februari 2024
Tempat : Hotel Grand Karlita Purwokerto
Tema : ***"Peran DPRD Dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD"***

Setelah kami mempelajari Proposal Saudara maka dengan ini kami sampaikan bahwa Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara menunjuk LPPM UNAKI Semarang sebagai pelaksana kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya agar diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat penunjukan ini dibuat atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANJARNEGARA



dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH
Pembina Tingkat I
NIP. 19720918 200501 1 008



**SURAT
PERJANJIAN
KERJASAMA
(MOU)**



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA DENGAN UNIVERSITAS AKI SEMARANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN WORKSHOP/BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor : 100.4.7/32/SETWAN/2024

Nomor : 048/SJ/REK/UNAKI/I/2024

Pada hari ini Kamis, tanggal Delapan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18- 01-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH : Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara berkedudukan di Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara di Jalan Pemuda No. 64 Banjarnegara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dr. TRI PURWANI, SE., MM. : Rektor Universitas AKI berkedudukan di Universitas AKI Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak yang bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang memerlukan jasa maupun pelayanan dari PIHAK KEDUA;
2. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara workshop/bimbingan teknis mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pelatihan secara publik maupun in-house untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerjasama penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara melalui pola kemitraan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Pedoman Orientasi Dan Pendalaman Tugas DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 7) Tanggal 20 Desember 2023;
4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 Nomor 52).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian kerjasama ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dan atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak berdasarkan hak dan kewajiban yang sama.
2. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan hubungan kelembagaan antar kedua belah pihak baik dalam pembinaan, asistensi, fasilitasi dan supervisi dalam penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

SYARAT PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan pekerjaan menurut perjanjian ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat:

1. Mentaati segala ketentuan yang telah disetujui bersama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selama penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara;
2. Melaksanakan peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah atau Instansi lain yang berwenang yang berhubungan dengan pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 4

PESERTA

Peserta Workshop/Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas DPRD Kabupaten Banjarnegara ini adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA berhak menerima dari PIHAK KEDUA berupa seluruh aspek pembelajaran dan akomodasi pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan peserta Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Menyediakan seluruh anggaran yang diperlukan dalam penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Memberi data, informasi serta keterangan-keterangan yang diperlukan PIHAK KEDUA selama dalam ruang lingkup pekerjaan.
1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan anggaran, peserta dan informasi terkait penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan seluruh aspek pembelajaran, akomodasi pelaksanaan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD, pengelolaan keuangan, surat menyurat, pelaporan, penandatanganan dan penerbitan sertifikat.

Pasal 6

WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN

Waktu dan tempat penyelenggaraan Workshop/Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024 di Hotel Grand Karlita Purwokerto, Jl. S. Parman No. 296, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) kali kegiatan dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan Bimtek dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2024, yang besarnya sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
2. Besaran biaya penyelenggaraan Bimtek/Workshop bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara disepakati Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) per orang.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Apabila terjadi peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan PARA PIHAK yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya (*force majeure*), seperti huru-hara, peperangan, makar, revolusi, kebakaran, embargo, sabotase, gempa bumi, banjir, badai/angin topan, pemogokan umum yang bukan merupakan kelalaian PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA, kebijakan/aturan Pemerintah yang berwenang dengan jelas menyatakan sebagai keadaan memaksa yang secara langsung mempengaruhi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerjasama ini.
2. Segala perubahan/pembatalan terhadap Surat Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENUTUP

Demikian Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup dan oleh karenanya sah serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK PERTAMA

dr. AHMAD SETIAWAN, M.PH
Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara

PIHAK KEDUA

Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
Rektor Universitas AKI



**SURAT
PERMOHONAN
REKOMENDASI**



UNIVERSITAS AKI

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : universitasaki@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

Nomor : 047/SM/REK/UNAKI/I/2024
Lampiran : 1 bendel
Perihal : **Permohonan Rekomendasi dan Monitoring**

Kepada Yth.

**Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah**

Di Semarang

Dengan hormat,

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan Workshop, bersama ini kami Rektor Universitas AKI bermaksud untuk mengajukan Permohonan Rekomendasi dan Monitoring kegiatan Workshop yang akan diselenggarakan pada :

Hari : Jum'at s.d Minggu
Tanggal : 02 – 04 Februari 2024
Peserta : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara
Jumlah : 50 Orang
Tempat Pelaksanaan : Hotel “**Grand Karlita**” Jl. S. Parman No. 296, Purwokerto
Banyumas 53141

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan agar dapat diterima dan diberikan rekomendasi. Atas bimbingan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 18 Januari 2024
Rektor,

Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.
NIDN. 0609027101

Tembusan ;

1. Kepala LPPM Universitas AKI
2. Arsip



**SURAT
REKOMENDASI
BPSDMD**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman <http://bpsdmd.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 30 Januari 2024

Nomor : 073.3/PT11/868.366/2024

Kepada :

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Rekomendasi Penyelenggaraan
Workshop Bagi Pimpinan Dan
Anggota DPRD Kabupaten
Banjarnegara

Rektor Universitas AKI
di
TEMPAT

Menunjuk surat Saudara Nomor 047/SM/REK/UNAKI/I/2024, tanggal 18 Januari 2024, hal Rekomendasi Penyelenggaraan Workshop Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Banjarnegara, dengan hormat disampaikan bahwa kami telah memeriksa berkas kelengkapan dokumen yang telah diajukan dan menyatakan telah memenuhi syarat, selanjutnya dengan ini memberikan rekomendasi pelaksanaan kegiatan Workshop DPRD Kabupaten Banjarnegara yang akan dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan 04 Februari 2024 bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto.

Sehubungan dengan itu, diminta perhatian Saudara untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Pendalaman Tugas berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan lainnya tentang Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pada Masa Endemi;
2. Proses penyelenggaraan Workshop agar dilakukan dengan metode pembelajaran yang tepat, dengan pemilihan narasumber/tenaga pengajar agar mempertimbangkan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sehingga substansi/materi yang diberikan dapat meningkatkan kompetensi anggota DPRD;
3. Materi Workshop agar mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan meliputi:
 - a. Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah;
 - b. Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD;
 - c. ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi;
 - d. Focus Group Discussion (FGD);
4. Anggaran Workshop agar dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan administrasi pertanggungjawaban keuangan menjadi tanggung jawab pihak Universitas AKI;
5. Penyelenggara harus melaporkan pelaksanaan Workshop secara tertulis kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah. Laporan dimaksud mendeskripsikan seluruh proses pembelajaran sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku, antara lain partisipasi peserta, metode pembelajaran, dan kualitas pemberi materi/tenaga pengajar/narasumber yang disampaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan kegiatan;

6. BPSDMD Provinsi Jawa Tengah akan menugaskan 1 (satu) orang Pegawai BPSDMD Provinsi Jawa Tengah guna melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penyelenggaraan Workshop dimaksud. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan kajian untuk penyempurnaan dan penetapan pelaksanaan kegiatan sejenis berikutnya;
7. Permohonan nomor registrasi disampaikan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
8. Dalam hal pelaksanaan pendalaman tugas tidak sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dalam menghadapi Pandemi *Covid-19* maka rekomendasi tidak berlaku dan tidak akan diterbitkan nomor registrasi;
9. Informasi dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi BPSDMD Provinsi Jawa Tengah u.p. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu melalui Telepon/Faksimile (024) 7473066 *excention* 108 / (024) 7473701

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah



Dr. SADIMIN, S.Pd, M.Eng

Pembina Utama Muda

NIP. 19721206 199412 1 001

TEMBUSAN disampaikan kepada :

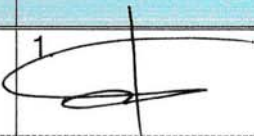
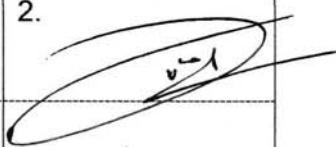

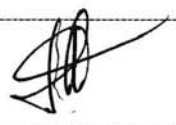

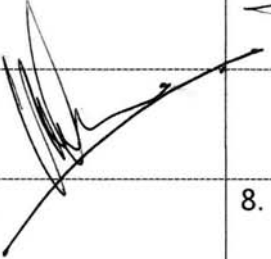

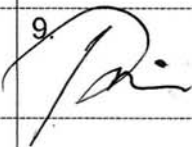
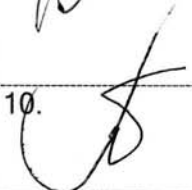
1. Gubernur Jawa Tengah;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Bupati Banjarnegara;
 4. Sekretaris DPRD Kabupaten Banjarnegara;
-




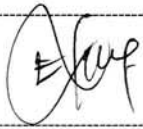



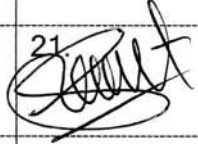







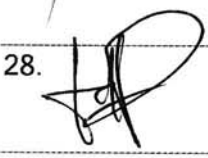

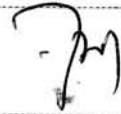


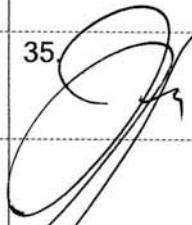
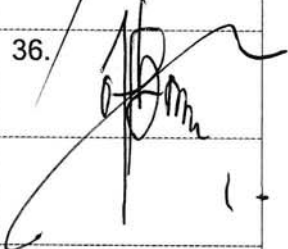
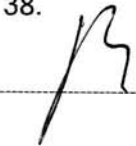

DAFTAR HADIR PESERTA


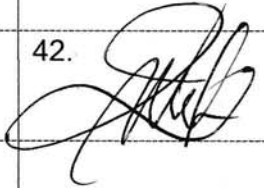


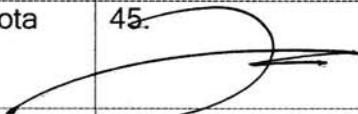



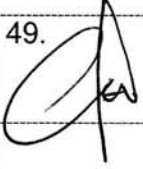
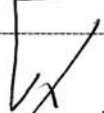
DAFTAR HADIR
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH
DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”
 Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

Hari/Tanggal : Jum'at, 02 Februari 2024
 Jam : 13.00 - 19.00 WIB
 Acara : Cek In & Registrasi Peserta

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	Ketua	1.	
2.	ARIF BUDI WALUYO, SE	Wakil Ketua		2. 
3.	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun	Wakil Ketua	3.	
4.	H. EDY PURWANTO	Wakil Ketua		4. 
5.	WACHYU HIDAYAT	Anggota	5.	
6.	H. SRI HARYATI	Anggota		6. 
7.	H. DIDI SUNARYO	Anggota	7.	
8.	ANWAR, ST	Anggota		8. 
9.	M. SOLAKHUDIN F	Anggota	9.	
10.	Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	Dr. AMALIA DESIANA	Anggota	11.	
12.	MARNO	Anggota		12. 
13.	Dra. Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM	Anggota	13. 	
14.	TUGIYO	Anggota		14. 
15.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	Anggota	15. 	
16.	KHUSNUL LATHOIF	Anggota		16. 
17.	BAMBANG SUPARNO	Anggota	17. 	
18.	SITI KOMARIAH	Anggota		18. 
19.	ANA SUSANTO	Anggota	19. 	
20.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	Anggota		20. 
21.	SLAMET	Anggota	21. 	
22.	MOCH. RACHMANUDIN	Anggota		22. 
23.	SRI RAHAYU, SH	Anggota	23. 	
24.	SITI MUDRIATI, SH	Anggota		24. 
25.	REVI TENEL LIA, A.Md	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	ENDI HARYANTO	Anggota		26. 
27.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	Anggota	27. 	
28.	GALIH PAMUNGKAS	Anggota		28. 
29.	Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd	Anggota	29. 	
30.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	Anggota		30. 
31.	H. MUKH NURIN, S.Pd., MM	Anggota	31. 	
32.	PUJO HARDIANSAH	Anggota		32. 
33.	H. DEDI SUROMLI	Anggota	33. 	
34.	ACHMAD SALABI	Anggota		34. 
35.	WASIS PUJIARTO	Anggota	35. 	
36.	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S	Anggota		36. 
37.	MARSUDIN	Anggota	37.	
38.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	Anggota		38. 
39.	ISNAN RIJADI ACHMAD	Anggota	39. 	
40.	SLAMET RIYADI, S.Pd.I.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	ACHMAD SRIYADI	Anggota	41. 	
42.	DYAH WINDARTI M	Anggota		42. 
43.	AGUS JUNAIDI	Anggota	43. 	
44.	DJARKASI	Anggota		44. 
45.	MUH. GURUH DA PAMUJI	Anggota	45. 	
46.	H. BAWONO, S.Sos, MM	Anggota		46. 
47.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	Anggota	47. 	
48.	BAMBANG PURNOMO ADI	Anggota		48. 
49.	NURUL IPTAK	Anggota	49. 	
50.	SLAMET SUNARYONO	Anggota		50. 

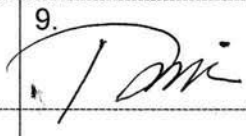
DAFTAR HADIR




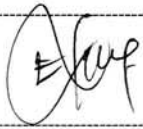

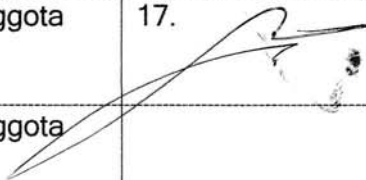
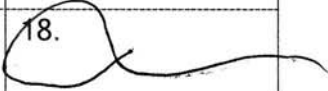


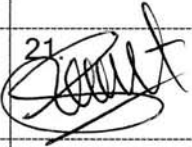



WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA


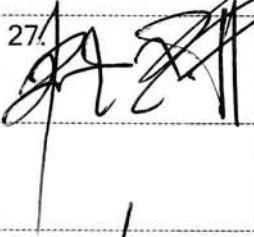
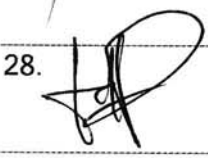

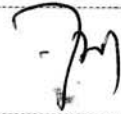
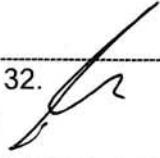


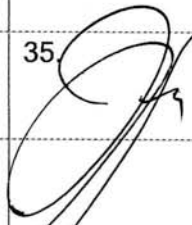
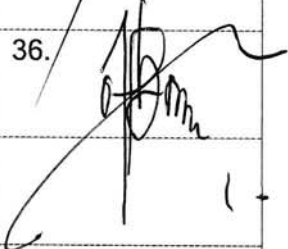
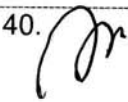
“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”


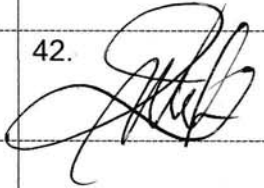


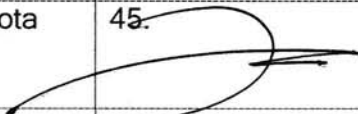


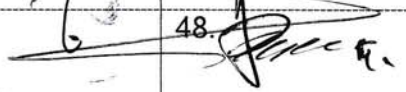
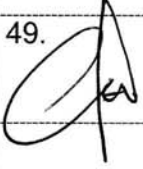
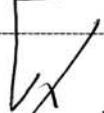
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

Hari/Tanggal : **Sabtu, 03 Februari 2024**
 Jam : 08.00 - 11.45 WIB
 Acara : **PEMBUKAAN & SAMBUTAN**
 (Rektor Universitas AKI & Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara)
 Materi 1 : Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah
 Narasumber : Drs. Ismail Amir, M.Si

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	Ketua	1. 	
2.	ARIF BUDI WALUYO, SE	Wakil Ketua		2. 
3.	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. EDY PURWANTO	Wakil Ketua		4. 
5.	WACHYU HIDAYAT	Anggota	5.	
6.	H. SRI HARYATI	Anggota		6. 
7.	H. DIDI SUNARYO	Anggota	7. 	
8.	ANWAR, ST	Anggota		8. 
9.	M. SOLAKHUDIN F	Anggota	9. 	
10.	Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI	Anggota		10. 

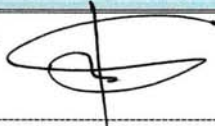
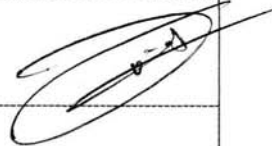
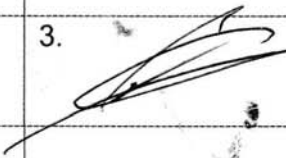

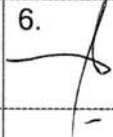
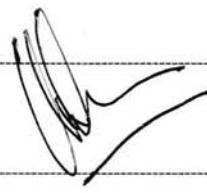



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	Dr. AMALIA DESIANA	Anggota	11.	
12.	MARNO	Anggota		12. 
13.	Dra. Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM	Anggota	13. 	
14.	TUGIYO	Anggota		14. 
15.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	Anggota	15. 	
16.	KHUSNUL LATHOIF	Anggota		16. 
17.	BAMBANG SUPARNO	Anggota	17. 	
18.	SITI KOMARIAH	Anggota		18. 
19.	ANA SUSANTO	Anggota	19. 	
20.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	Anggota		20. 
21.	SLAMET	Anggota	21. 	
22.	MOCH. RACHMANUDIN	Anggota		22. 
23.	SRI RAHAYU, SH	Anggota	23. 	
24.	SITI MUDRIATI, SH	Anggota		24. 
25.	REVI TENEL LIA, A.Md	Anggota	25. 	




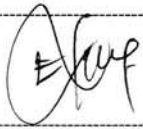

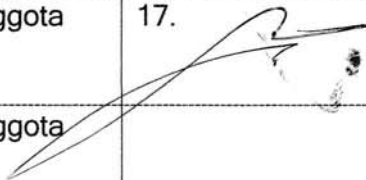
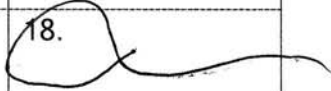


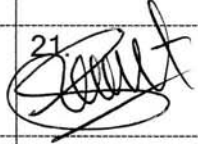




NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	ENDI HARYANTO	Anggota		26. 
27.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	Anggota	27. 	
28.	GALIH PAMUNGKAS	Anggota		28. 
29.	Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd	Anggota	29. 	
30.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	Anggota		30. 
31.	H. MUKH NURIN, S.Pd., MM	Anggota	31. 	
32.	PUJO HARDIANSAH	Anggota		32. 
33.	H. DEDI SUROMLI	Anggota	33. 	
34.	ACHMAD SALABI	Anggota		34. 
35.	WASIS PUJIARTO	Anggota	35. 	
36.	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S	Anggota		36. 
37.	MARSUDIN	Anggota	37.	
38.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	Anggota		38. 
39.	ISNAN RIJADI ACHMAD	Anggota	39. 	
40.	SLAMET RIYADI, S.Pd.I.	Anggota		40. 


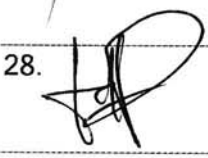

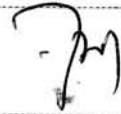


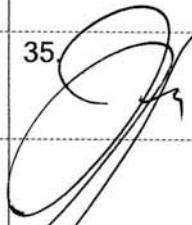
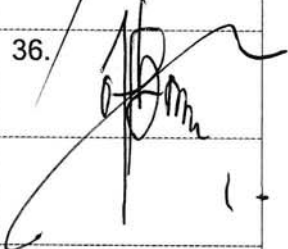
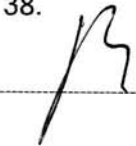

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	ACHMAD SRIYADI	Anggota	41. 	
42.	DYAH WINDARTI M	Anggota		42. 
43.	AGUS JUNAIDI	Anggota	43. 	
44.	DJARKASI	Anggota		44. 
45.	MUH. GURUH DA PAMUJI	Anggota	45. 	
46.	H. BAWONO, S.Sos, MM	Anggota		46. 
47.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	Anggota	47. 	
48.	BAMBANG PURNOMO ADI	Anggota		48. 
49.	NURUL IPTAK	Anggota	49. 	
50.	SLAMET SUNARYONO	Anggota		50. 


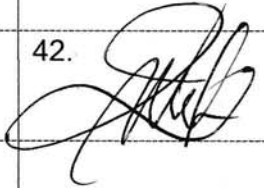


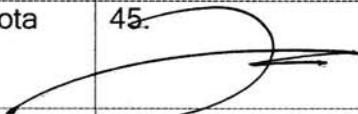


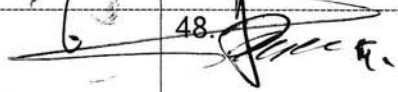
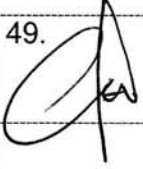
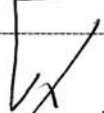
DAFTAR HADIR
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH
DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Februari 2024
Jam : 13.30 - 18.00 WIB
Materi 2 : Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD
Narasumber : Drs. Ismail Amir, M.Si

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	Ketua	1.	
2.	ARIF BUDI WALUYO, SE	Wakil Ketua		2. 
3.	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun	Wakil Ketua	3.	
4.	H. EDY PURWANTO	Wakil Ketua		4. 
5.	WACHYU HIDAYAT	Anggota	5.	
6.	H. SRI HARYATI	Anggota		6. 
7.	H. DIDI SUNARYO	Anggota	7.	
8.	ANWAR, ST	Anggota		8. 
9.	M. SOLAKHUDIN F	Anggota	9.	
10.	Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI	Anggota		10. 

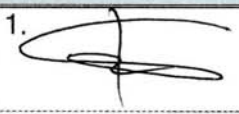
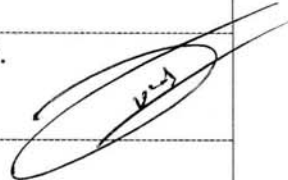
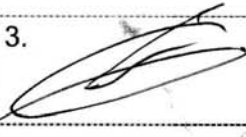

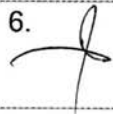
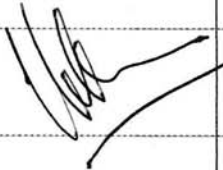

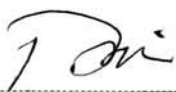

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	Dr. AMALIA DESIANA	Anggota	11.	
12.	MARNO	Anggota		12. 
13.	Dra. Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM	Anggota	13. 	
14.	TUGIYO	Anggota		14. 
15.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	Anggota	15. 	
16.	KHUSNUL LATHOIF	Anggota		16. 
17.	BAMBANG SUPARNO	Anggota	17. 	
18.	SITI KOMARIAH	Anggota		18. 
19.	ANA SUSANTO	Anggota	19. 	
20.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	Anggota		20. 
21.	SLAMET	Anggota	21. 	
22.	MOCH. RACHMANUDIN	Anggota		22. 
23.	SRI RAHAYU, SH	Anggota	23. 	
24.	SITI MUDRIATI, SH	Anggota		24. 
25.	REVI TENEL LIA, A.Md	Anggota	25. 	




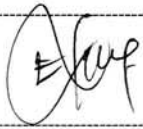

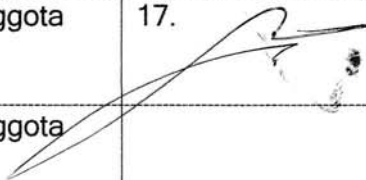
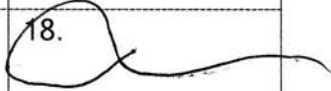


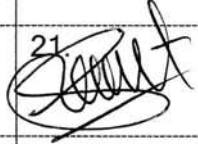



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	ENDI HARYANTO	Anggota		26. 
27.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	Anggota	27. 	
28.	GALIH PAMUNGKAS	Anggota		28. 
29.	Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd	Anggota	29. 	
30.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	Anggota		30. 
31.	H. MUKH NURIN, S.Pd., MM	Anggota	31. 	
32.	PUJO HARDIANSAH	Anggota		32. 
33.	H. DEDI SUROMLI	Anggota	33. 	
34.	ACHMAD SALABI	Anggota		34. 
35.	WASIS PUJIARTO	Anggota	35. 	
36.	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S	Anggota		36. 
37.	MARSUDIN	Anggota	37.	
38.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	Anggota		38. 
39.	ISNAN RIJADI ACHMAD	Anggota	39. 	
40.	SLAMET RIYADI, S.Pd.I.	Anggota		40. 


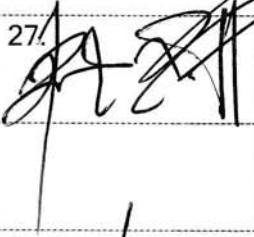
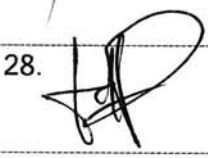


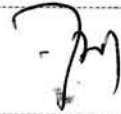
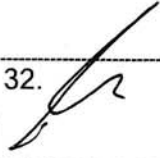


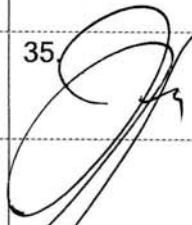
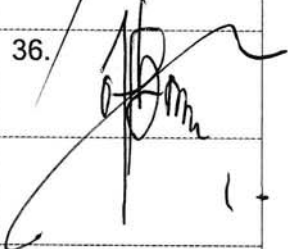
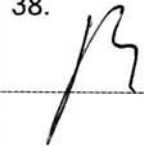

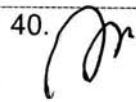
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	ACHMAD SRIYADI	Anggota	41. 	
42.	DYAH WINDARTI M	Anggota		42. 
43.	AGUS JUNAIDI	Anggota	43. 	
44.	DJARKASI	Anggota		44. 
45.	MUH. GURUH DA PAMUJI	Anggota	45. 	
46.	H. BAWONO, S.Sos, MM	Anggota		46. 
47.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	Anggota	47. 	
48.	BAMBANG PURNOMO ADI	Anggota		48. 
49.	NURUL IPTAK	Anggota	49. 	
50.	SLAMET SUNARYONO	Anggota		50. 


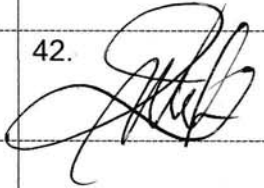


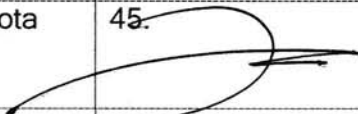

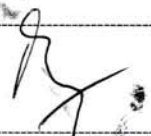

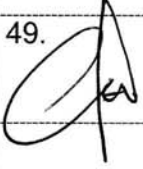
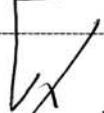
DAFTAR HADIR
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
"PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH
DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD"
 Hotel "Grand Karlita" Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

Hari/Tanggal : Sabtu, 03 Februari 2024
 Jam : 19.00 - 22.45 WIB
 Materi 3 : ESQ : Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi
 Narasumber : Widayanto Bintang

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	Ketua	1. 	
2.	ARIF BUDI WALUYO, SE	Wakil Ketua		2. 
3.	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. EDY PURWANTO	Wakil Ketua		4. 
5.	WACHYU HIDAYAT	Anggota	5.	
6.	H. SRI HARYATI	Anggota		6. 
7.	H. DIDI SUNARYO	Anggota	7. 	
8.	ANWAR, ST	Anggota		8. 
9.	M. SOLAKHUDIN F	Anggota	9. 	
10.	Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI	Anggota		10. 

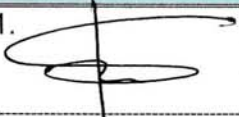
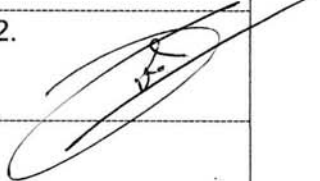
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	Dr. AMALIA DESIANA	Anggota	11.	
12.	MARNO	Anggota		12. 
13.	Dra. Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM	Anggota	13. 	
14.	TUGIYO	Anggota		14. 
15.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	Anggota	15. 	
16.	KHUSNUL LATHOIF	Anggota		16. 
17.	BAMBANG SUPARNO	Anggota	17. 	
18.	SITI KOMARIAH	Anggota		18. 
19.	ANA SUSANTO	Anggota	19. 	
20.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	Anggota		20. 
21.	SLAMET	Anggota	21. 	
22.	MOCH. RACHMANUDIN	Anggota		22. 
23.	SRI RAHAYU, SH	Anggota	23. 	
24.	SITI MUDRIATI, SH	Anggota		24. 
25.	REVI TENEL LIA, A.Md	Anggota	25. 	




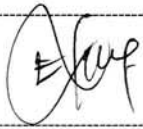



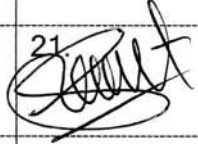




NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	ENDI HARYANTO	Anggota		26. 
27.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	Anggota	27. 	
28.	GALIH PAMUNGKAS	Anggota		28. 
29.	Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd	Anggota	29. 	
30.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	Anggota		30. 
31.	H. MUKH NURIN, S.Pd., MM	Anggota	31. 	
32.	PUJO HARDIANSAH	Anggota		32. 
33.	H. DEDI SUROMLI	Anggota	33. 	
34.	ACHMAD SALABI	Anggota		34. 
35.	WASIS PUJIARTO	Anggota	35. 	
36.	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S	Anggota		36. 
37.	MARSUDIN	Anggota	37.	
38.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	Anggota		38. 
39.	ISNAN RIJADI ACHMAD	Anggota	39. 	
40.	SLAMET RIYADI, S.Pd.I.	Anggota		40. 


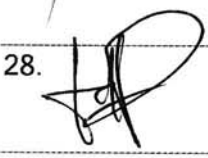

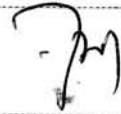


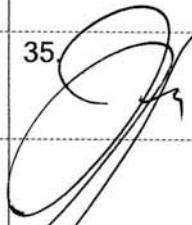
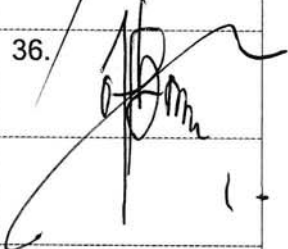
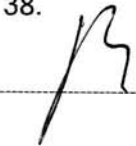

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	ACHMAD SRIYADI	Anggota	41. 	
42.	DYAH WINDARTI M	Anggota		42. 
43.	AGUS JUNAIDI	Anggota	43. 	
44.	DJARKASI	Anggota		44. 
45.	MUH. GURUH DA PAMUJI	Anggota	45. 	
46.	H. BAWONO, S.Sos, MM	Anggota		46. 
47.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	Anggota	47. 	
48.	BAMBANG PURNOMO ADI	Anggota		48. 
49.	NURUL IPTAK	Anggota	49. 	
50.	SLAMET SUNARYONO	Anggota		50. 


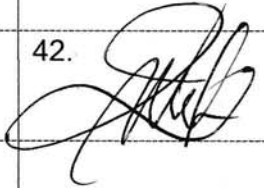


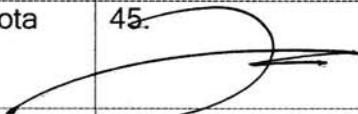


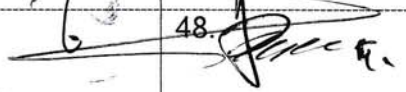
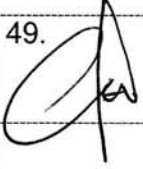
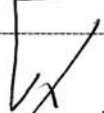
DAFTAR HADIR
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH
DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”
 Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

Hari/Tanggal : Minggu, 04 Februari 2024
 Jam : 08.15 - 11.45 WIB
 Materi 4 : Focus Group Discussion (FGD)
PENUTUPAN
 Moderator : Risahlan Rafsanzani, SH., MH.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1.	ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE	Ketua	1. 	
2.	ARIF BUDI WALUYO, SE	Wakil Ketua		2. 
3.	GURUH TRI ADI PUTRA, S.Akun	Wakil Ketua	3. 	
4.	H. EDY PURWANTO	Wakil Ketua		4. 
5.	WACHYU HIDAYAT	Anggota	5.	
6.	H. SRI HARYATI	Anggota		6. 
7.	H. DIDI SUNARYO	Anggota	7. 	
8.	ANWAR, ST	Anggota		8. 
9.	M. SOLAKHUDIN F	Anggota	9. 	
10.	Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI	Anggota		10. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
11.	Dr. AMALIA DESIANA	Anggota	11.	
12.	MARNO	Anggota		12. 
13.	Dra. Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM	Anggota	13. 	
14.	TUGIYO	Anggota		14. 
15.	Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH	Anggota	15. 	
16.	KHUSNUL LATHOIF	Anggota		16. 
17.	BAMBANG SUPARNO	Anggota	17. 	
18.	SITI KOMARIAH	Anggota		18. 
19.	ANA SUSANTO	Anggota	19. 	
20.	H. NUR MUHAMMAD SALIM	Anggota		20. 
21.	SLAMET	Anggota	21. 	
22.	MOCH. RACHMANUDIN	Anggota		22. 
23.	SRI RAHAYU, SH	Anggota	23. 	
24.	SITI MUDRIATI, SH	Anggota		24. 
25.	REVI TENEL LIA, A.Md	Anggota	25. 	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
26.	ENDI HARYANTO	Anggota		26. 
27.	ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH	Anggota	27. 	
28.	GALIH PAMUNGKAS	Anggota		28. 
29.	Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd	Anggota	29. 	
30.	DIAN EKA WINARTININGSIH, SE	Anggota		30. 
31.	H. MUKH NURIN, S.Pd., MM	Anggota	31. 	
32.	PUJO HARDIANSAH	Anggota		32. 
33.	H. DEDI SUROMLI	Anggota	33. 	
34.	ACHMAD SALABI	Anggota		34. 
35.	WASIS PUJIARTO	Anggota	35. 	
36.	Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S	Anggota		36. 
37.	MARSUDIN	Anggota	37.	
38.	RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM	Anggota		38. 
39.	ISNAN RIJADI ACHMAD	Anggota	39. 	
40.	SLAMET RIYADI, S.Pd.I.	Anggota		40. 

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
41.	ACHMAD SRIYADI	Anggota	41. 	
42.	DYAH WINDARTI M	Anggota		42. 
43.	AGUS JUNAIDI	Anggota	43. 	
44.	DJARKASI	Anggota		44. 
45.	MUH. GURUH DA PAMUJI	Anggota	45. 	
46.	H. BAWONO, S.Sos, MM	Anggota		46. 
47.	UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt	Anggota	47. 	
48.	BAMBANG PURNOMO ADI	Anggota		48. 
49.	NURUL IPTAK	Anggota	49. 	
50.	SLAMET SUNARYONO	Anggota		50. 



DAFTAR HADIR NARASUMBER



UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT




Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : ippm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR NARASUMBER
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

NO	NAMA	HARI/TANGGAL	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. Ismail Amir, M.Si	Sabtu, 03 Februari 2024	Dewan Nasional FITRA	1. 
2.	Drs. Ismail Amir, M.Si	Sabtu, 03 Februari 2024	Dewan Nasional FITRA	2. 
3.	Widayanto Bintang	Sabtu, 03 Februari 2024	Sekolah Movera Public Speaking School	3. 



BIODATA NARASUMBER



UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lpmm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

BIODATA NARASUMBER

Nama : Widayanto Bintang
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 03 Oktober 2084
Instansi : Movera Public Speaking
Jabatan : Kepala Sekolah
E_mail : Widayanto84@gmail.com
No. Hp : 085641432420
Alamat : Jl. Mekar Wangi Blok DI.7 Tritih Lor Jeruk Legi Cilacap
Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan Formal dan Non Formal	Tahun
1.	S1 - UNNES	
2.	Sertifikat Trainer By Jamil Azzaini	
3.	NLP (Neuro Linguistic Programing) di NFNLP USA Florida	
4.		
5.		

Riwayat Karir :

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Master Trainer Start Action Edutainment	
2.	Owner Bimbingan belajar KELAS AMPUH	
3.		
4.		
5.		

Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang
Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111
e-mail : lpdm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

BIODATA NARASUMBER

Nama : Widayanto Bintang
Tempat/Tanggal Lahir : Sragen, 03 Oktober 2084
Instansi : Movera Public Speaking
Jabatan : Kepala Sekolah
E_mail : Widayanto84@gmail.com
No. Hp : 085641432420
Alamat : Jl. Mekar Wangi Blok DI.7 Tritih Lor Jeruk Legi Cilacap

Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan Formal dan Non Formal	Tahun
1.	S1 - UNNES	
2.	Sertifikat Trainer By Jamil Azzaini	
3.	NLP (Neuro Linguistic Programing) di NFNLP USA Florida	
4.		
5.		

Riwayat Karir :

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Master Trainer Start Action Edutainment	
2.	Owner Bimbingan belajar KELAS AMPUH	
3.		
4.		
5.		

Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		



DAFTAR HADIR MODERATOR



UNIVERSITAS AKI

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang





Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR MODERATOR WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA

“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH DAN MEKANISME PENYUSUNAN
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”

Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

NO	NAMA	HARI/TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Sabtu, 03 Februari 2024	1. 
2.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Sabtu, 03 Februari 2024	2. 
3.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Sabtu, 03 Februari 2024	3. 
4.	Risahlan Rafsanjani, SH., MH.	Minggu, 04 Februari 2024	4. 



BIODATA MODERATOR



BIODATA MODERATOR

Nama : Risahlan Rafsanzani, SH., MH.
Tempat/Tanggal Lahir : Ruteng, 18 Oktober
No. Hp : 082242599370
E_mail : allan18@gmail.com
Alamat : Jl. Elang No. 07 Wedumartan DIY

Riwayat Pendidikan :

No.	Pendidikan	Tahun
1.	S1 UIN Sunan Kalijaga	
2.	S2 UIN Sunan Kalijaga	
3.		
4.		
5.		

Riwayat Karir :

No.	Pekerjaan	Tahun
1.	Konsultan Hukum	2028 - Sekarang
2.		
3.		
4.		
5.		

Organisasi :

No.	Organisasi	Tahun
1.	KAHM Kota Yogyakarta	2022 - Sekarang
2.		
3.		
4.		
5.		



DAFTAR HADIR MONITORING



UNIVERSITAS AKI


LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Imam Bonjol No. 15 - 17 Semarang

Telp. (024) 3552 555, Fax. (024) 3552 111

e-mail : lppm@unaki.ac.id, website: www.unaki.ac.id

DAFTAR HADIR MONITORING
WORKSHOP DPRD KABUPATEN BANJARNEGARA
“PERAN DPRD DALAM PEMBAHASAN LKPJ KEPALA DAERAH
DAN MEKANISME PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD”
Hotel “Grand Karlita” Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024

NO	HARI & TANGGAL HADIR	NAMA	TANDA TANGAN
1.	Sabtu, 03 Februari 2024	Moch Said	1. 
			2.



KOMPILASI MATERI



Materi :

Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah

Oleh :

Drs. Ismail Amir, M.Si
(Dewan Nasional FITRA)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2024**

Pendalaman fungsi pengawasan DPRD Banjarnegara

Pembahasan LKPJ Kepala Daerah 2023

(PP 13 tahun 2019 dan permendagri 18 tahun 2020)

Ismail Amir
Konsultan Perencanaan dan Anggaran Daerah
Pendiri seknas FITRA Jakarta
Hp. 082140827791

Fungsi DPRD

Pembentukan Perda

- Dihasilkan peraturan daerah yang aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prosesnya deliberatif dan partisipatif

Anggaran

- Dirumuskannya APBD yang kredibel, efektif dan efisien

Pengawasan

- Terwujudnya pemerintahan yang amanah (transparan, akuntabel dan partisipatif).

Bentuk Pengawasan DPRD

UU 23/2014 tentang Pemda

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota
2. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota; dan
3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagaimana Fungsi Pengawasan Dilakukan?

- Ketiga fungsi yang dimiliki oleh DPRD tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain.
- Fungsi pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan *policy guideline* yang telah ditetapkan sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai.

PENGAWASAN

- Menjamin Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah sesuai ketentuan yang berlaku.
- Memberikan arahan kepada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Tujuan pengawasan Oleh DPRD

- Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana;
- Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan;
- Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan;
- **Pengawasan keuangan daerah:** Memastikan bahwa input kegiatan menghasilkan output sesuai rencana untuk mencapai outcome dan dampak program yang jelas dan terukur sesuai yang telah ditetapkan dalam perencanaan dalam RPJMD dan RKPD.

Strategi Pengawasan

Prinsip-prinsip:

- Holistik, dimulai dari agenda setting sampai dengan implementasi;
- Mencegah terjadinya penyimpangan lebih baik dari pada menemukan kesalahan;
- Partisipatoris: melibatkan seluruh stakeholder.

Implementasi

- Memiliki agenda pengawasan
- Memiliki standar, sistem dan prosedur pengawasan
- Membangun jejaring
- Menerapkan teknologi IT untuk membuat mekanisme kerja pemerintahan menjadi transparan

Untuk memaksimalkan fungsi Pengawasan Apa Modal DPRD?

- **Kapasitas individu** dan **kelembagaan** DPRD
- **Supporting dari sekretariat** (data, informasi dan tenaga ahli);
- **Dukungan Regulasi dan tata tertib** yang kuat dan responsif
- **Network**

PERBEDAAN PENGAWASAN DGN AUDIT

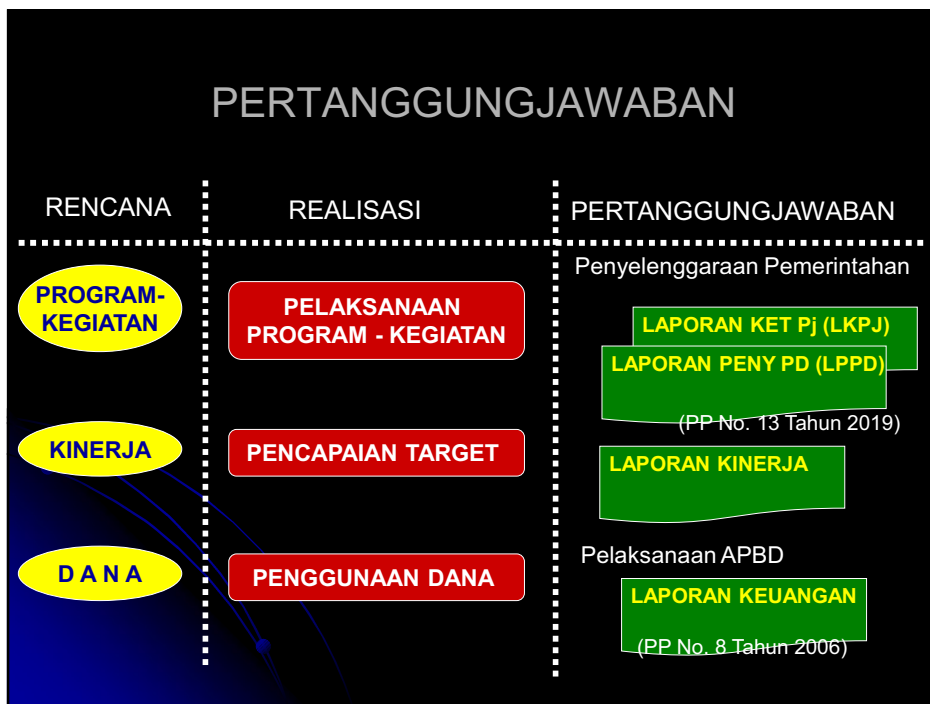
- *Pengawasan* tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam *Audit*
- *Pengawasan* tidak mencakup pemahaman atas pengendalian intern, penetapan risiko pengendalian, pengujian catatan akuntansi, dan pemerolehan bahan bukti melalui inspeksi, konfirmasi dan prosedur lainnya.

MEMBACA DAN ANALISIS LKPJ KEPALA DAERAH



Pasal 69 – UU. 23 tahun 2014

- Kepala daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).
- Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.



Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

- LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD, memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

(Pasal 1 PP 13 - 2019)

APA ITU LKPJ?

- Laporan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja
- Bersifat Tahunan.
- Disusun berdasarkan Perencanaan dan anggaran tahunan
- Disampaikan KDH kepada DPRD
- Bukan alat untuk memberhentikan KDH
- Hasilnya rekomendasi perbaikan kebijakan

Bagaimana Prinsip penyusunannya ?

- Transparansi
- Akuntabilitas
- Akurasi
- Objektif.

RUANG LINGKUP LKPJ

- Laporan Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah
- Laporan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan

Laporan Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Laporan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan terdiri atas capaian kinerja :

1. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat
2. Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah Daerah provinsi.

- Laporan Hasil pelaksanaan penugasan Pemerintah Daerah berupa: penugasan Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- Laporan Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan juga memuat permasalahan dan upaya penyelesaian setiap tugas pembantuan atau penugasan.

Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

- Kepala daerah menyusun LKPJ berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri **permendagri 18 tahun 2020**.
- LKPJ disusun berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan anggaran tahunan.

Sistematika LKPJ

BAB I PENDAHULUAN.

- Memuat dasar hukum pembentukan daerah, Visi dan Misi Kepala Daerah dan data umum daerah

BAB II PERUBAHAN PENJABARAN APBD

- Menjelaskan perubahan terhadap kegiatan dan alokasi yang terkait dengan pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan pembiayaan dalam rangka pencapaian target.

BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

- 1). Capaian pelaksanaan program dan kegiatan
- 2). Capaian kinerja Kebijakan strategis yang ditetapkan
- 3). Tindak lanjut rekomendasi DPRD tahun sebelumnya

BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- Menjelaskan identifikasi tentang Tugas Pembantuan yang diterima dari pemerintahan di atasnya dan identifikasi urusan pemerintahan yang diberikan kepada tingkatan pemerintahan dibawahnya beserta hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan upaya penyelesaian.

BAB V PENUTUP

KEANDALAN INFORMASI LKPJ

- Keandalan Informasi:
 - Informasi LKPJ harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.
 - Menyajikan setiap fakta secara jujur. Dapat diverifikasi
(Ps 8, 9 Permendagri 18/2020)
- Data yang digunakan dalam LKPJ merupakan data yang digunakan untuk menyusun LPPD. Dalam hal data tidak tersedia, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan menyiapkan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan LKPJ atau meminta ke badan pusat statistic
(ps 16 permendagri 18/2020)

APA PERAN DPRD THD LKPJ ?

Kedudukan DPRD

- DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah bersama dengan Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dibantu Perangkat Daerah.
(UU nomor 23/2014 tentang Pemda)
- Dengan demikian DPRD bersama Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang setara dan bersifat kemitraan, merupakan penanggungjawab pelaksanaan pembangunan daerah.
- Dalam kedudukan kerja yang setara tersebut tidak hanya terkandung makna kesetaraan dalam hal otoritas tetapi juga semestinya setara dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

PENGATURAN DPRD

DASAR HUKUM

- ❑ DPRD semula diatur dalam UU 17/2014 ttg MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- ❑ Sekarang dimasukkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sejalan dengan Pasal 18 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 (local representative).
- ❑ Integrasi pengaturan DPRD, mengakhiri dualisme regulasi dan mempertegas kedudukan dan fungsi DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam NKRI.

KDH & Wa.Kdh

- **UNSUR PENYELENGGARA PEMDA**

KDH
(pejabat negara)

ANGGOTA DPRD

- **SEBAGAI PEJABAT DAERAH**

IMPLIKASI
- HAK KEUANGAN
- HAK PROTOKOLER

Pasal 20, PP 13 Thn 2019

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima, DPRD harus melakukan pembahasan LKPJ dengan memperhatikan:

- Capaian kinerja program dan kegiatan
- Pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ, DPRD memberikan rekomendasi sebagai bahan :

- Penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya;
 - Penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; dan
 - Penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau kebijakan strategis kepala daerah.
 - Penyempurnaan kebijakan strategis Kepala Daerah
- Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ kabupaten/kota sebagaimana, disampaikan kepada bupati/wali kota dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - Hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), ditindaklanjuti oleh kepala daerah (Permendagri 18 tahun 2020 ps1 19).

Analisis LKPJ oleh DPRD meliputi :

Pelaksanaan RKPD 2021

- Capaian kinerja makro (IPM, Kemiskinan, Pengangguran, Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan perkapita, ketimpangan pendapatan/gini ratio)
- Capaian kinerja keuangan (pelaksanaan kebijakan keuangan daerah serta target dan realisasi APBD 2021)
- Capaian kinerja program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi, Misi tujuan dan sasaran daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD 2021 dan progresnya terhadap RPJMD.
- Capaian kinerja Urusan Pemerintahan (out put dan hasil).
- Capaian SPM (urusan wajib-pelayanan dasar).
- Pelaksanaan Perda / Peraturan Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
- Pelaksanaan kebijakan strategis Kepala Daerah.
- Progres rekomendasi DPRD atas LKPJ tahun sebelumnya



- ### Tujuan dan Sasaran Banjarnegara RPD 2023 - 2026
- Tujuan:**
1. Meningkatnya kondusivitas wilayah
 2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi
 3. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah.
 4. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung Lingkungan
 5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
 6. Meningkatnya kualitas layanan public
 7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

PeriksaIndikator Kinerja Tujuan dan sasaran
Beserta Targetnya tahun 2023
(Bab V Tabel 5.1 RPD Banjarnegara)

Sasaran Makro Pembangunan RKPD 2023

- Pertumbuhan ekonomi antara 4,50 – 5,50%;
- Laju inflasi sebesar 3% ± 1%;
- PDRB per kapita sebesar lebih dari Rp. 22 juta;
- Persentase penduduk miskin sebesar 15,35 – 14,35%;
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,5% - 5,00%; dan
- IPM sebesar 68,34.
- Untuk Target kinerja per urusan/OPD periksa tabel 6.1 RKPD 2023

Mengukur Kemampuan Penyelenggaraan OTODA

3 Aspek pengukuran kinerja pemerintahan daerah:

- Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- Aspek Pelayanan Umum
- Aspek Daya Saing Daerah

6 pendekatan analisis LKPJ

- *Pertama*, Kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ
- *Kedua*, Penilaian kinerja Pembangunan ekonomi makro dan sosial daerah
- *Ketiga*, Penilaian kinerja keuangan daerah
- *Keempat*, Penilaian kinerja Program dan Kegiatan untuk mencapai Visi, Misi, tujuan dan sasaran daerah dan capaian 3 aspek pembangunan daerah (*aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah*).
- *Kelima*, Penilaian kinerja tugas pembantuan & penugasan
- *Keenam*, telaah atas LHP BPK tahun lalu dan progresnya.
- *Ketujuh* penilaian implementasi kebijakan strategis kepala daerah

Terima Kasih





Materi :

Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD

Oleh :

Drs. Ismail Amir, M.Si
(Dewan Nasional FITRA)

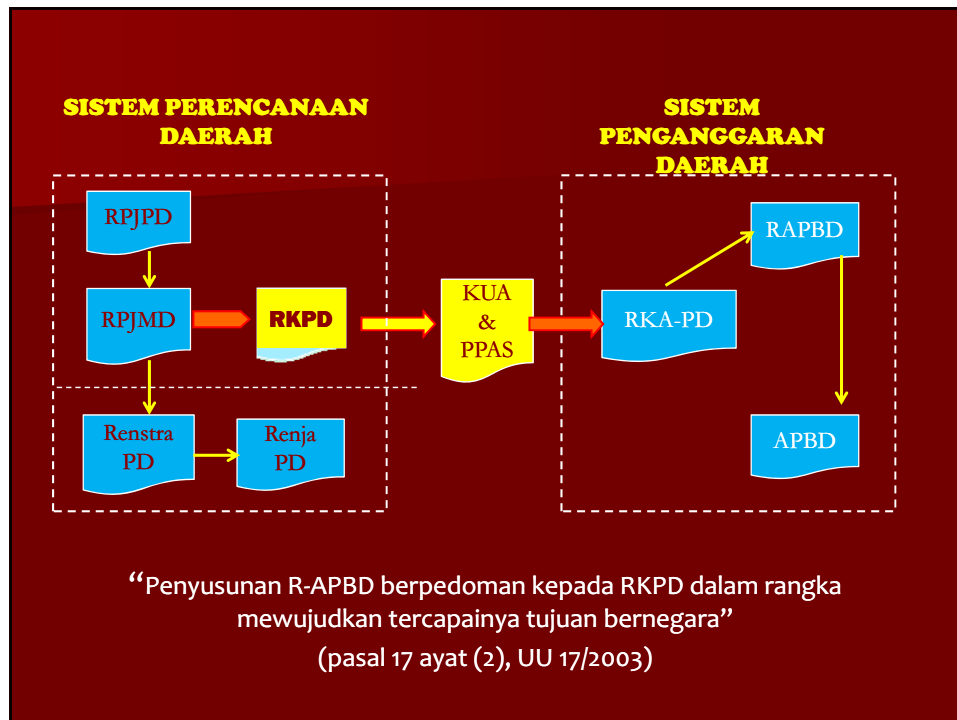
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2024**

**RESES YANG ASPIRATIF
DAN PENYUSUNAN POKIR DPRD YANG
BERKUALITAS**

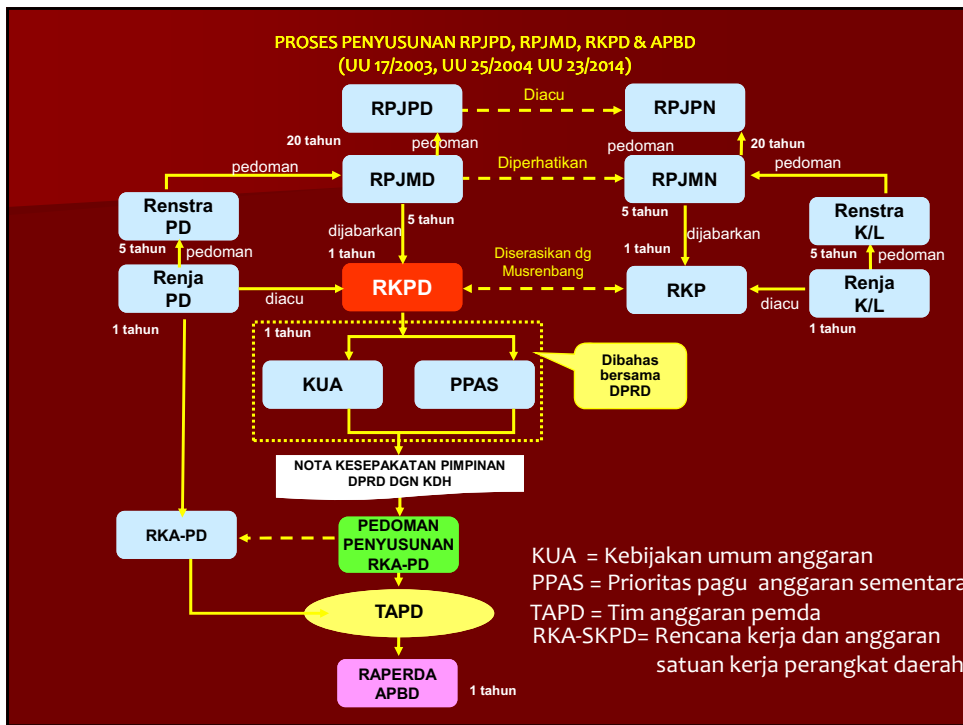
Ismail Amir
Konsultan Perencanaan dan Anggaran daerah
Pendiri Seknas FITRA
HP 082140827791

**PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
DAERAH**

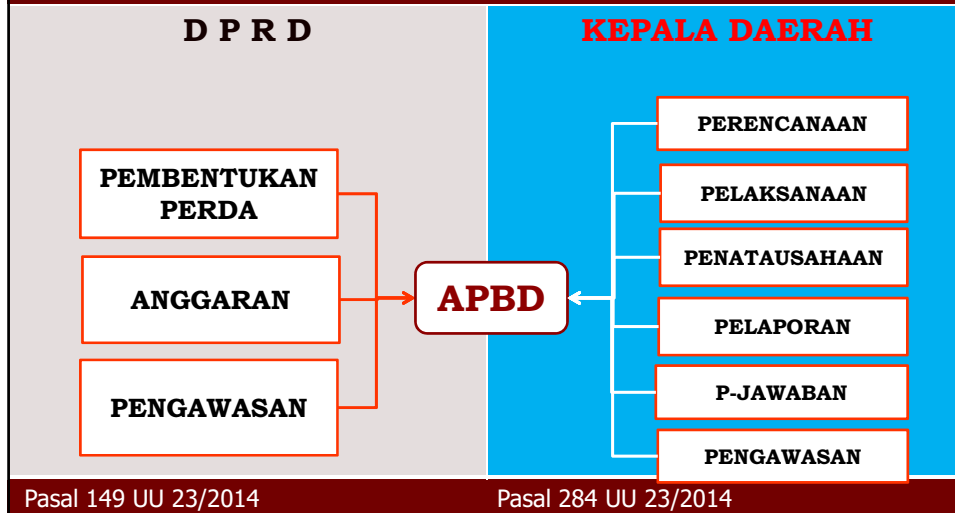


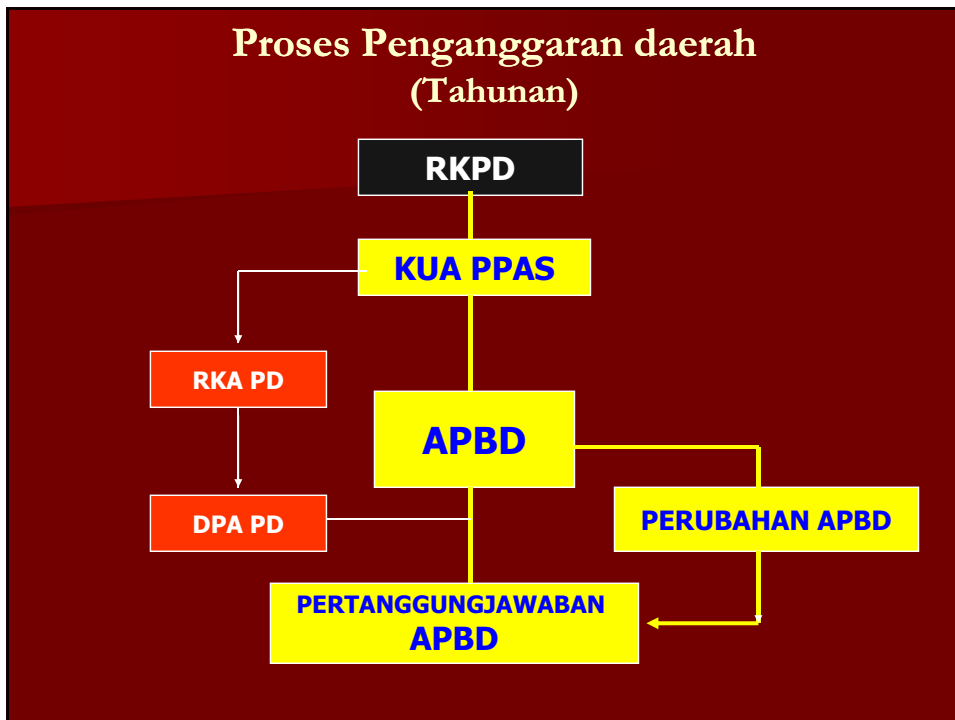
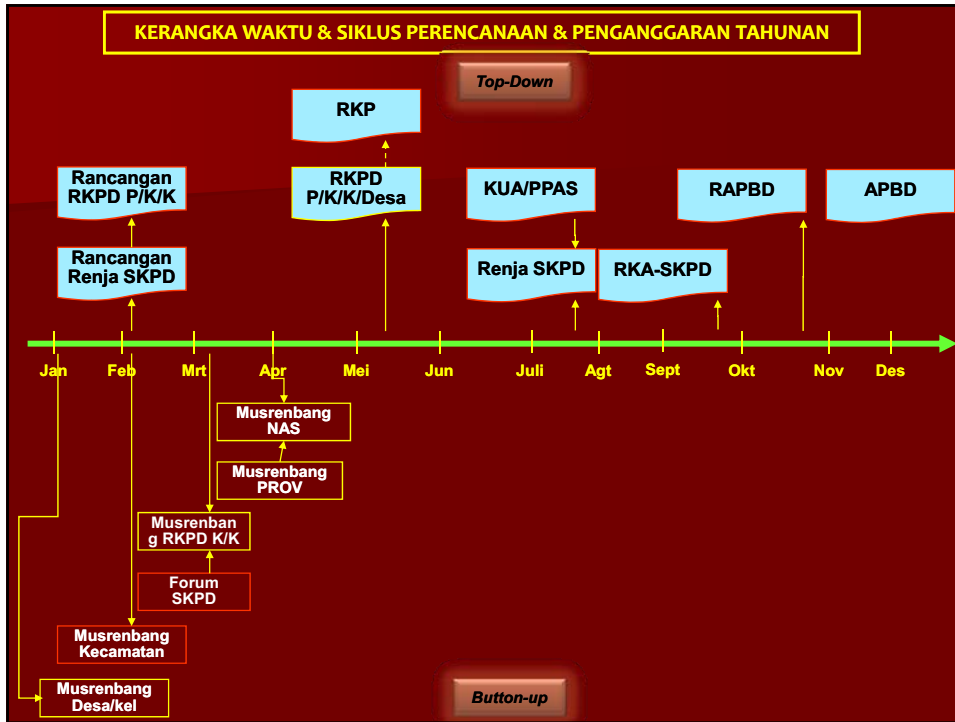
HUBUNGAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH

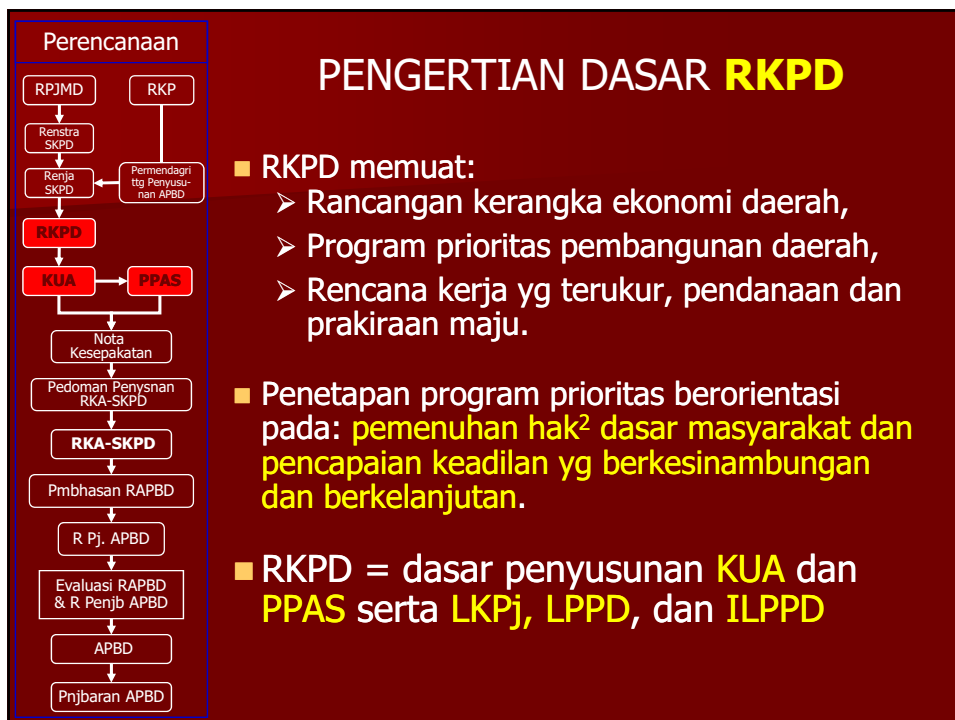
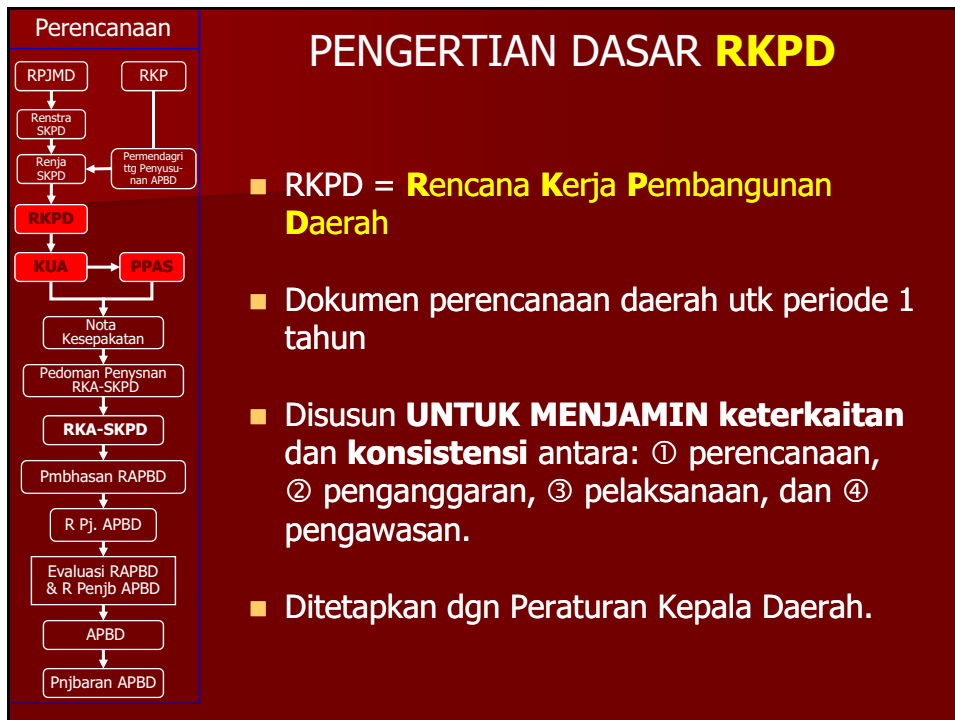
- Perencanaan dan penganggaran merupakan dua sisi kebijakan yang tidak bisa dipisahkan, seperti **dua sisi koin mata uang**
- Perencanaan tanpa penganggaran seperti **janji palsu**
- Penganggaran tanpa perencanaan seperti **menyalip ditikungan**
- Perencanaan dan penganggaran yang buruk sama dengan **merencanakan kegagalan pembangunan dan kebocoran anggaran**

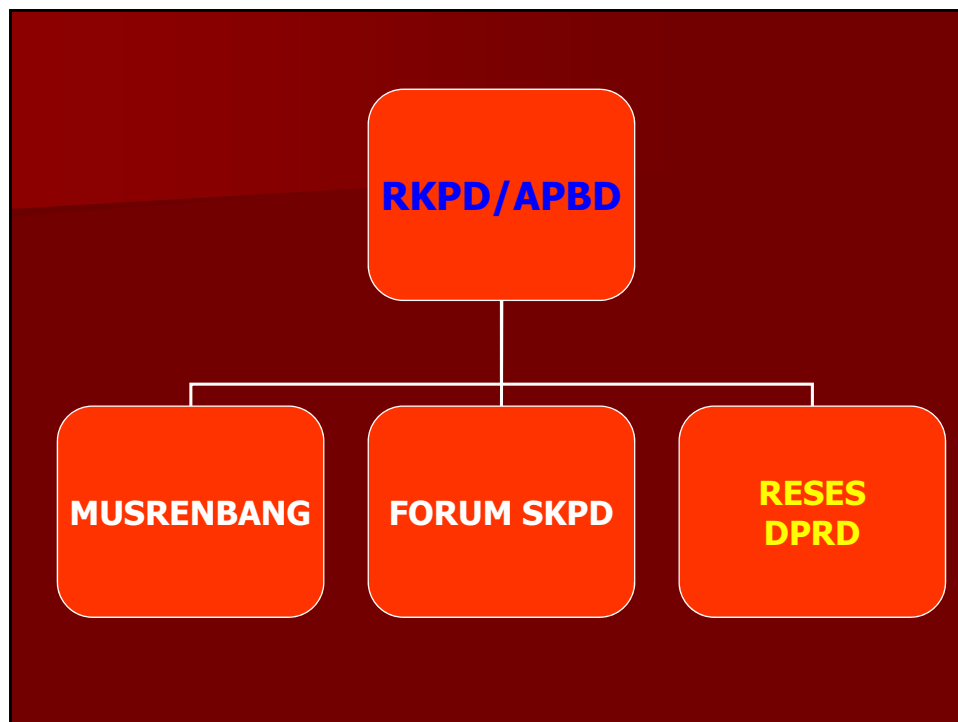


PERAN DPRD DAN PEMDA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH









MANAGEMENT RESES YANG ASPIRATIF
SALAH SATU INPUT PROGRAM DALAM RKPD

Dasar Hukum

- ❑ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- ❑ Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif DPRD
- ❑ Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tatib DPRD
- ❑ PMDN 62 Tahun 2017 Tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
- ❑ PMDN 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❑ Surat MDN kepada KDH dan DPRD Se-Indonesia terkait Penjelasan terhadap Implementasi Substansi PP No 18 Tahun 2017 serta PMDN No 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan KKD serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban DO

APA ITU RESES?



- MASA KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DILUAR KEGIATAN MASA SIDANG DAN DILUAR GEDUNG;
- DILAKUKAN SEBANYAK 3 KALI DALAM SETAHUN ATAU 14 KALI RESES DALAM PERIODE 5 TAHUN MASA JABATAN DPRD;
- PELAKSANAAN RESES MERUPAKAN KEWAJIBAN BAGI ANGGOTA DPRD DALAM RANGKA MENJARING ASPIRASI MASYARAKAT SECARA BERKALA DENGAN CARA BERTEMU KONSTITUEN PADA DAERAH PEMILIHANNYA MASING-MASING GUNA MENINGKATKAN KUALITAS, PRODUKTIVITAS, DAN KINERJA DPRD DALAM MEWUJUDKAN Keadilan, Kesejahteraan Rakyat, serta GUNA MEWUJUDKAN PERAN DPRD DALAM MENGEMBANGKAN *CHECK AND BALANCES* ANTARA DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH

Kewajiban Anggota DPRD

- a.
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k.

Pasal 161 UU 23/2014

RESES

Menjaring Aspirasi pada Dapil

Menyiapkan Laporan Reses

Disampaikan Dalam Paripurna

PELAKSANAAN RESES PERSEORANGAN/KELOMPOK ANGGOTA DPRD

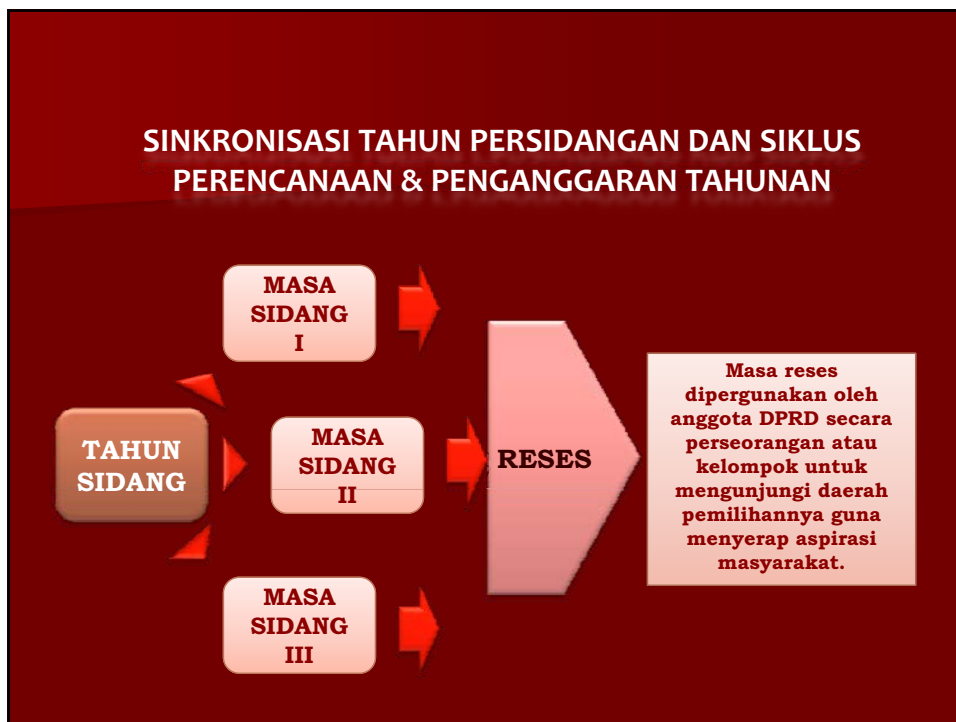
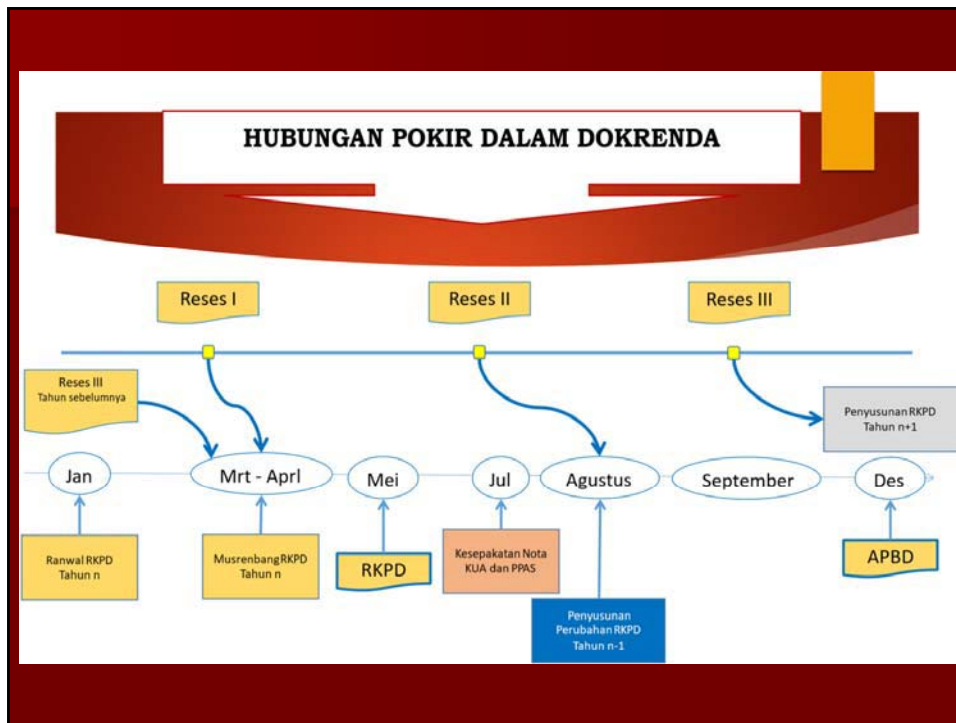


Reses DPRD

- Reses merupakan **kewajiban** bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka **menjaring aspirasi masyarakat** secara berkala ---- bertemu konstituen pada Dapil masing-masing
- Meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat,
- Mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan **check and balances** antara DPRD dan pemerintah daerah.
- Reses merupakan bentuk **komunikasi dua arah** antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja.
- **Tujuan reses** adalah **menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen** dan pengaduan masyarakat
- Pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai **perwujudan perwakilan** rakyat dalam pemerintahan.

Prinsip Dasar Pelaksanaan Reses

1. Bukan merupakan kegiatan rutinitas;
2. Merupakan rangkaian dari perencanaan pembangunan → Penyusunan RKPD
3. Memperhatikan Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD)



SINKRONISASI TAHUN PERSIDANGAN DAN SIKLUS PERENCANAAN PENGANGGARAN TAHUNAN



Bahan/Topik Reses DPRD

- Apa Tema Pembangunan dan arah kebijakan tahun perencanaan?
- Apa Prioritas pembangunan tahun perencanaan?
- Sasaran, Indikator dan target kinerja tahun perencanaan?

(Tema, prioritas pembangunan sasaran dan indikator - Sesuai dengan RPJMD)

Output Reses DPRD

Temuan/ Permasalahan	Lokasi	Usulan solusi / Kegiatan/ Program	Volume	SKPD terkait

**PENYUSUNAN POKIR DPRD
YANG LEBIH BERKUALITAS**

SUMPAH JANJI ANGGOTA DPRD

(Pasal 157 UU 23/2014)

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan; **bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili** untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Permendagri 86 tahun 2017 pasal 78 ayat 2 dan 3

- Ayat (2). Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- Ayat (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 178
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

- **Kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses**
- **Pokir DPRD diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran**
- **Hasil telaahan Pokir DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD**
- **Pokir DPRD, disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan**

Pokir DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya

**DOKUMEN PENELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
DIPEROLEH DARI DPRD BERDASARKAN RISALAH RAPAT
DENGAR PENDAPAT DAN/ATAU RAPAT HASIL PENYERAPAN
ASPIRASI MELALUI RESES,**

**LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN DALAM RANGKA PENELAAHAN POKOK-
POKOK PIKIRAN DPRD, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT:**

1. Inventarisasi jenis program/ kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan Pokir DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD.

2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/ kegiatan hasil penelaahan tersebut.

3. Analisis kesesuaian Indikator kinerja yang serta lokasi yang diusulkan.

4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas.

5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD

6. Sajikan dalam tabel, seperti berikut:

FLOW PENYAMPAIAN POKIR DEWAN



Tabel T-B.57.
Rumusan Usulan Program/Kegiatan
Hasil Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan Validasi
Provinsi/Kabupaten/kota*)

No	Program/ Kegiatan	Indikator kinerja	Volume	Lokasi	Perangkat Daerah terkait	Validasi/ Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
dst						

*) Sesuaikan atau diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.

Isi/Muatan Pokir DPRD

1. Pengantar, tujuan dan dasar hukum
2. Evaluasi kinerja RKPD tahun lalu
3. Masalah dan tantangan tahun serta isu strategis yang akan datang
4. Kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah
5. Prioritas Pembangunan daerah dan target kinerjanya
6. Program, kegiatan dan indikator kinerja

Contoh poin 6: Rumusan Usulan Program/kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Volume	Lokasi	SKPD Terkait	Ket
1						
2						
3						

BAHAN/KERANGKA DASAR POKIR DPRD

Tujuan dan Sasaran Banjarnegara RPD 2023 - 2026

Tujuan:

1. Meningkatnya kondusivitas wilayah
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi
3. Meningkatnya kinerja perekonomian daerah.
4. Meningkatnya daya dukung dan daya tamping Lingkungan
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Meningkatnya kualitas layanan public
7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

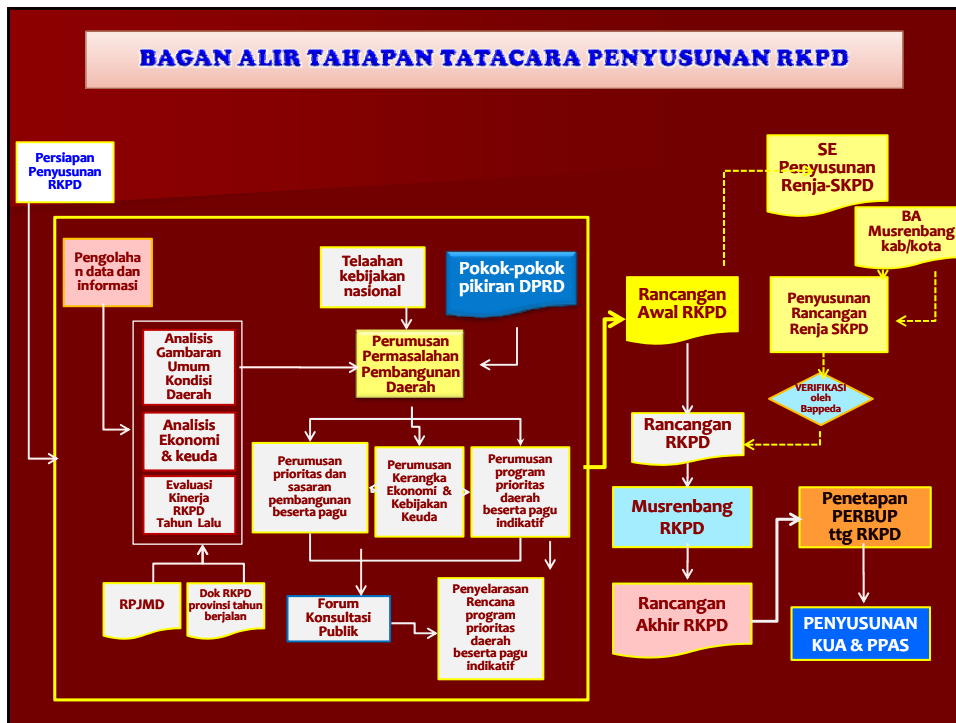
POKIR DPRD BANJARNEGARA TAHUN 2025.

TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN USULAN DPRD	SUB KEGIATAN USULAN DPRD
1. Meningkatnya kondusivitas wilayah	• Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama		
	• Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana		
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	• Meningkatkan partisipasi politik masyarakat		
	• Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal		
	• Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak		
3. Meningkatnya kinerja perekonomian	• Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha		
	• Meningkatnya kesempatan kerja		
	• Meningkatnya pemerataan pembangunan		
	• Meningkatnya stabilitas harga		
	• Meningkatnya daya saing daerah		

LANJUTANPOKIR DPRD BANJARNEGARA TAHUN 2025

TUJUAN	SASARAN	KEGIATAN USULAN DPRD	SUB KEGIATAN USULAN DPRD
4. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan 		
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 		
6. Meningkatnya kualitas layanan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan public 		
7. Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah 		
	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya cakupan rumah layak huni 		
	<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 		

SINKRONIASI POKIR DPRD
DALAM PERENCANAAN PENGANGGARAN



Apa implikasi hal ini?

- Apakah ada jaminan usulan Pokok-pokok pikiran DPRD dapat diakomodir?.
- Ketika di penganggaran, DPRD memiliki kewenangan untuk membahas dan menyetujui, tetapi ketika di Perencanaan, apa kewenangan DPRD?

BANGGAR DPRD MEMBERIKAN SARAN DAN PENDAPAT KEPADA KEPALA DAERAH SEBELUM PENETAPAN RKPD

PADA TAHAPAN PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD

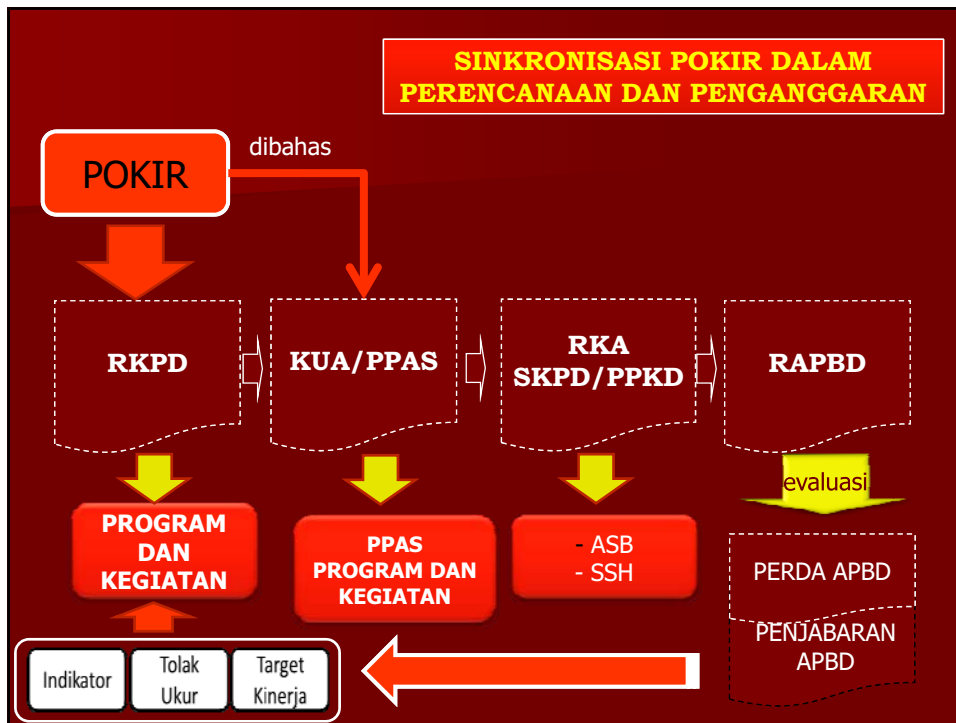
- Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil-Musrenbang RKPD.
- **Banggar DPRD memberikan saran dan pendapat berupa POKIR DPRD kepada KDH sebelum RKPD ditetapkan (Pasal 54 huruf a PP 12 Tahun 2018)**
- Perumusan Rancangan akhir RKPD Provinsi merupakan proses penyempurnaan Rancangan akhir RKPD berdasarkan masukan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Provinsi
- Rancangan akhir paling lambat pada akhir bulan Mei
- Rancangan akhir yang telah dibahas dijadikan bahan penyusunan Rancangan Perkada RKPD
- Gubernur dan Bupati/Walikota menyampaikan Rncangan Perkada RKPD Kepada Mendagri melalui Ditjen Bangda dan Kepada Gubernur melalui Kepala Bappedaa provinsi untuk difasilitasi. Dilakukan paling lama 15 hari sejak dokumen diterima secara lengkap.

Badan Anggaran memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum peraturan Kepala Daerah tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

Pasal 54 huruf a PP 12/2018

TAHAPAN PENYUSUNAN RKPD





DPRD ZAMAN OLD



MENGGUNAKAN METODE MANUAL/KONVENSIONAL DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI ANGGARAN

TIDAK DILENGKAPI DENGAN KETERSEDIAAN DATA REAL-TIME YANG BISA Mendukung FUNGSI LEGISLASI

FUNGSI PENGAWASAN MASIH MENGGUNAKAN METODE MANUAL

DPRD ZAMAN NOW

MEMANFAATKAN SISTEM INFORMASI DALAM MELAKSANAKAN DAN MENGAWAL PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN

MEMILIKI DUKUNGAN DATA REAL-TIME YANG DAPAT Mendukung PENYUSUNAN KEBIJAKAN YANG LEBIH AKTUAL DAN KOMPREHENSIF

MELAKSANAKAN FUNGSI PENGAWASAN (TERMASUK PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM) DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI



Terima Kasih



Materi :

ESQ :

Pembentukan Karakter dan Program Transformasi Pribadi

Oleh :

Widayanto Bintang

(Sekolah Movera Public Speaking School)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

**UNIVERSITAS AKI
SEMARANG
2024**



Value

SEM NAR
MOT AS

awarenes

FOR POLITIC

Hotel Grand Carlita, 3 Februari 2024

Widayanto Bintang
Trainer | Coach | Enterpreanuer



Terima Kasih



@TrainerAmpuh
Widayanto Bintang
Master Trainer Winning In Class

Pendidikan:

S-1, Pendidikan Fisika, UNNES
Sertifikat Trainer By Jamil Azzaini
Praktisi NLP (Neuro Linguistic Programing) dari NFNLP USA Florida
Praktisi Tallent Mapping lead by Abah Rama, LeadPro Jakarta
Mechanic Gamification Designer for education
NLP Trainer certified Neo NLP, NLP Coach certified NCA

Aktivitas Saat ini:

Kepala Sekolah MOVERA PUBLIC SPEAKING SCHOOL
Master Trainer Start Action Edutainment:
Owner PHOTOBOK STUDIO | FotoStudio | Digital Printing | Cinematografi
Fouder www.gameboardindonesia.com





Gamification designer

Super Brain

GAME BOARD

Petualangan penuh perjuangan untuk menjadi sosok **Super Brain/Sukses Person**
 Hanya yang kuat dan smart yang dapat memenangkan permainan ini.

www.boardgameindonesia.com

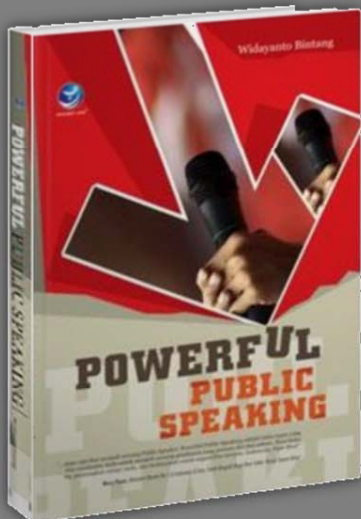




MOVERA
PUBLIC SPEAKING SCHOOL

POWERFUL PUBLIC SPEAKING TRAINING

"Membantu Supaya Presentasi Anda Naik Level Penuh Confidence, Sistematis dan Memiliki Power Berdampak pada Audience"



POWERFUL PUBLIC SPEAKING

IN HOUSE TRAINING PROGRAM

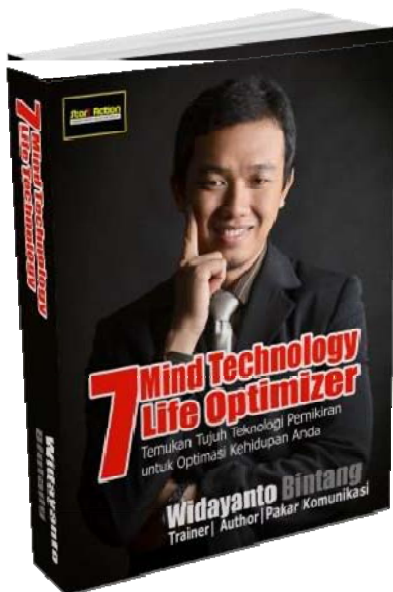
08564 1432429



"Kemampuan berbicara dengan baik, lancar dan tepat adalah salah satu faktor kunci keberhasilan Anda dalam kehidupan. Apakah Anda pernah mengalami hal ini: Mempunyai segudang aspirasi, segunung gagasan, tapi hanya tertahan dalam tenggorokan dan tersimpan dalam hati? Dan Anda tidak mengerti bagaimana harus mengeluarkan semuanya itu menjadi kata-kata? Jika Anda pernah mengalaminya atau bahkan menjadi pergumulan saat ini, ambil buku ini, beli, lalu baca! Tak ada satu orang pun yang mengatakan bahwa menjadi seorang pembicara yang handal itu adalah sebuah pekerjaan mudah. Tapi saya mau katakan bahwa siapa saja bisa menjadi seorang Public Speaker. Powerful Public Speaking adalah buku tepat yang bisa membantu Anda untuk menjadi seorang pembicara yang percaya diri dan sukses. Baca buku ini, perjuangkan mimpi Anda, dan berkaryalah untuk negara kita tercinta. Indonesia, Pasti Bisa!"

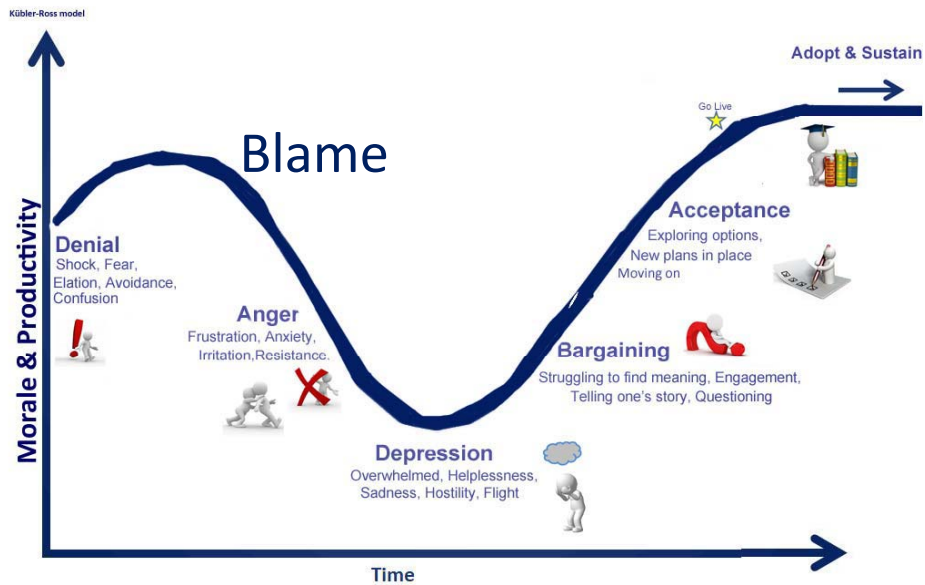
Merry Riana

Motivator Wanita No.1 di Indonesia & Asia
Tokoh Biografi Mega Best-Seller 'Mimpi Sejuta Dolar'
Radio Host 'The Merry Riana Show' on Sonora Network
The Most Powerful Women of 2012 (versi Her World Indonesia)
www.MerryRiana.com



7 Mind Technology Life optimizer

INDIVIDUAL RESPONSE TO CHANGE



BERUBAH

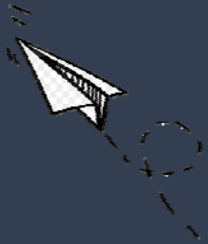
atau

PUNAH

What's New?

What's Next?

What's Better



Value awareness FOR POLITIC

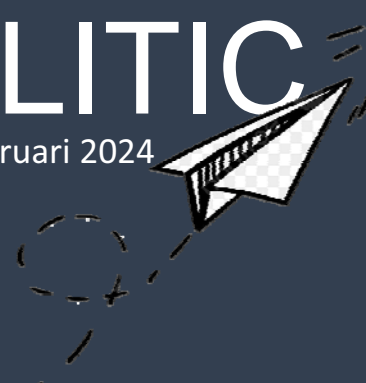
SEMINAR
MOTIVASI

Hotel Grand Carlita, 3 Februari 2024

Widayanto

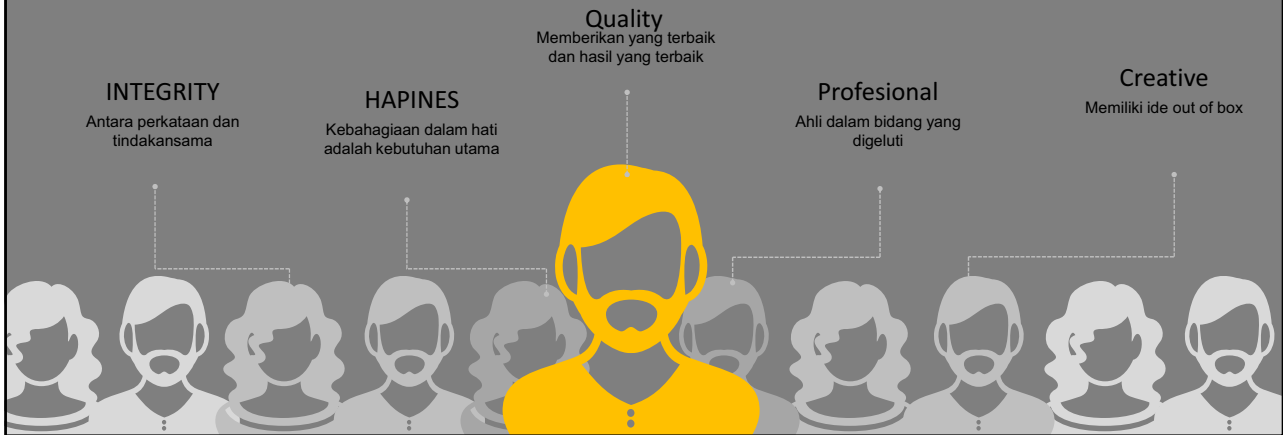
Trainer | Coach | Entrepreneur

Bintang



VALUE AWARENES

LIVE YOUR HIGHEST VALUE



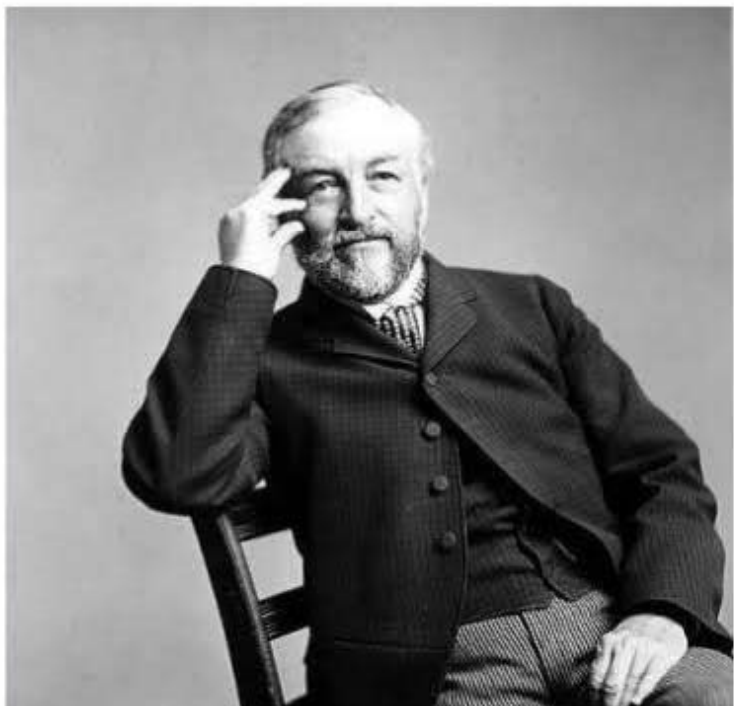


The **VALUE** you
Is The ^{give}life you LIVE

Samuel Pierpont Langley
(1834 – 1906)

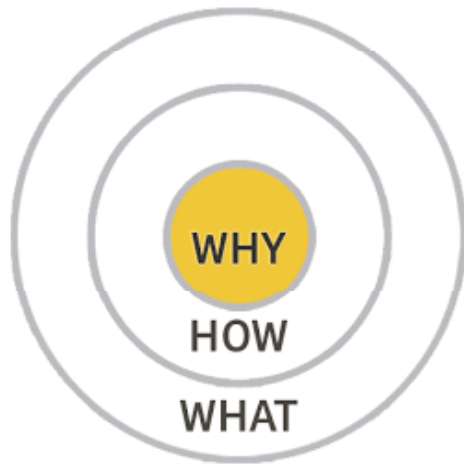
American astronomer,
physicist, inventor of the
bolometer and pioneer of
aviation.

- Professor of mathematics US Naval Academy
- Director, Allegheny Observatory
- Professor of astronomy, Western University of Pennsylvania
- Third Secretary, Smithsonian Institution
- Founder, Smithsonian Astrophysical Observatory





Act, Think & Communicate - from the INSIDE OUT



WHY - your Purpose

Your motivation. What do you Believe?

HOW - your Process

Specific actions taken to realize your WHY.

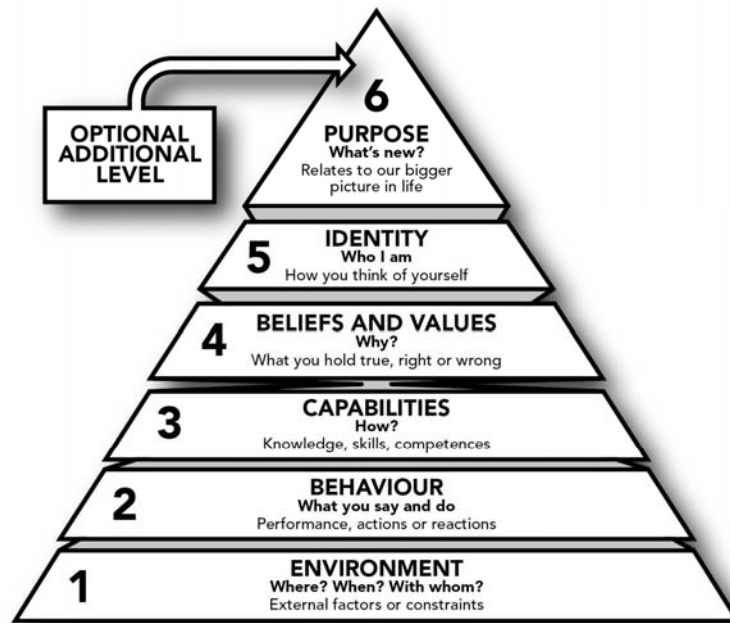
WHAT - your Result

What do you do? The result of WHY. Proof.



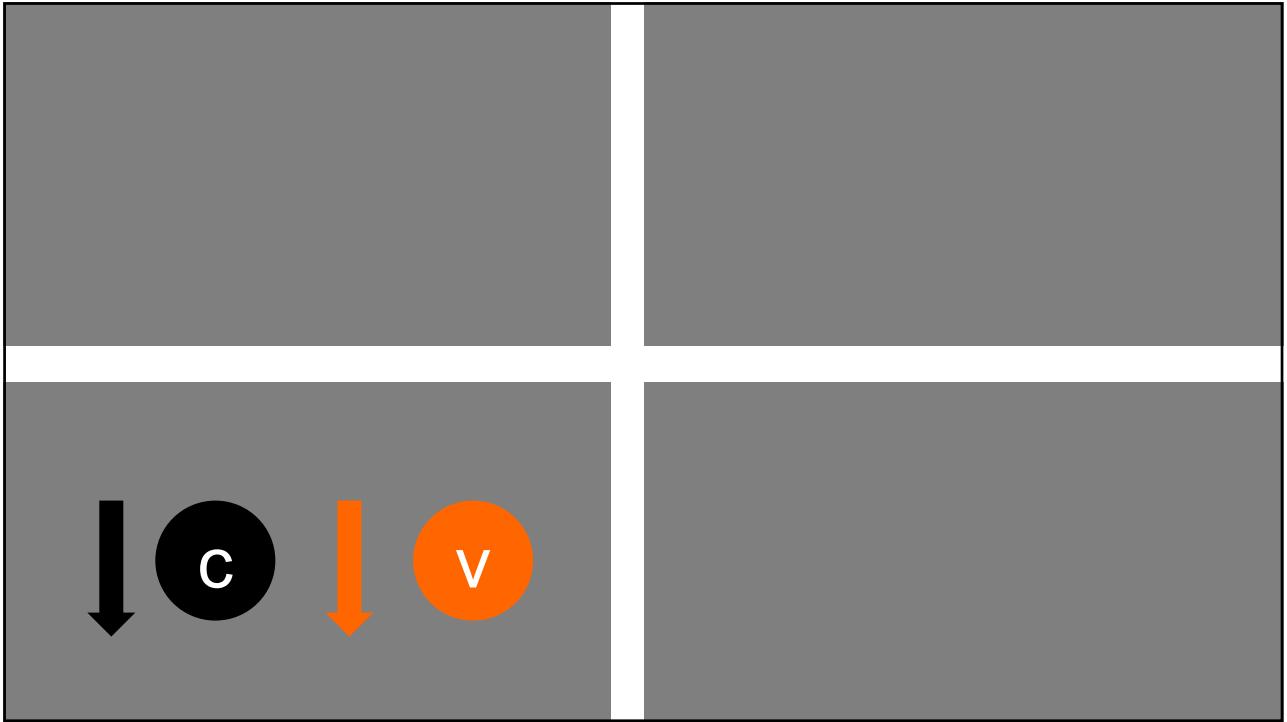
People don't buy what you do; they buy why you do it and what you do simply proves what you believe.

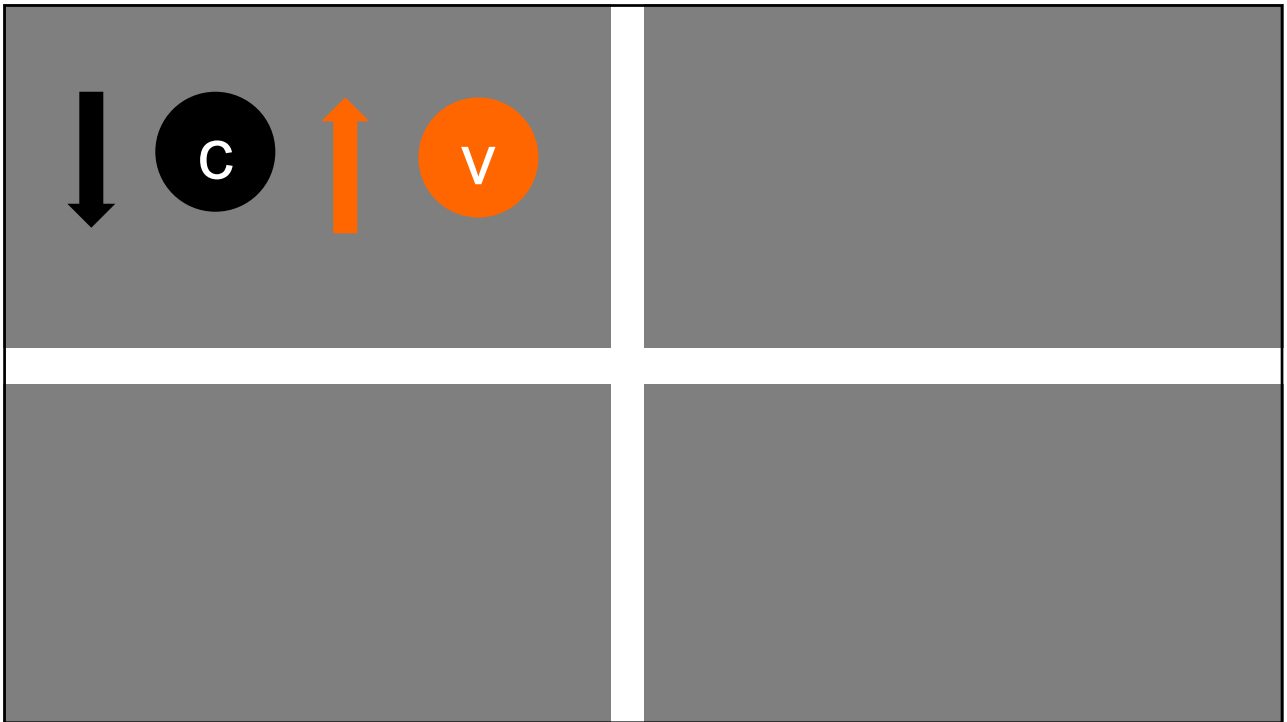
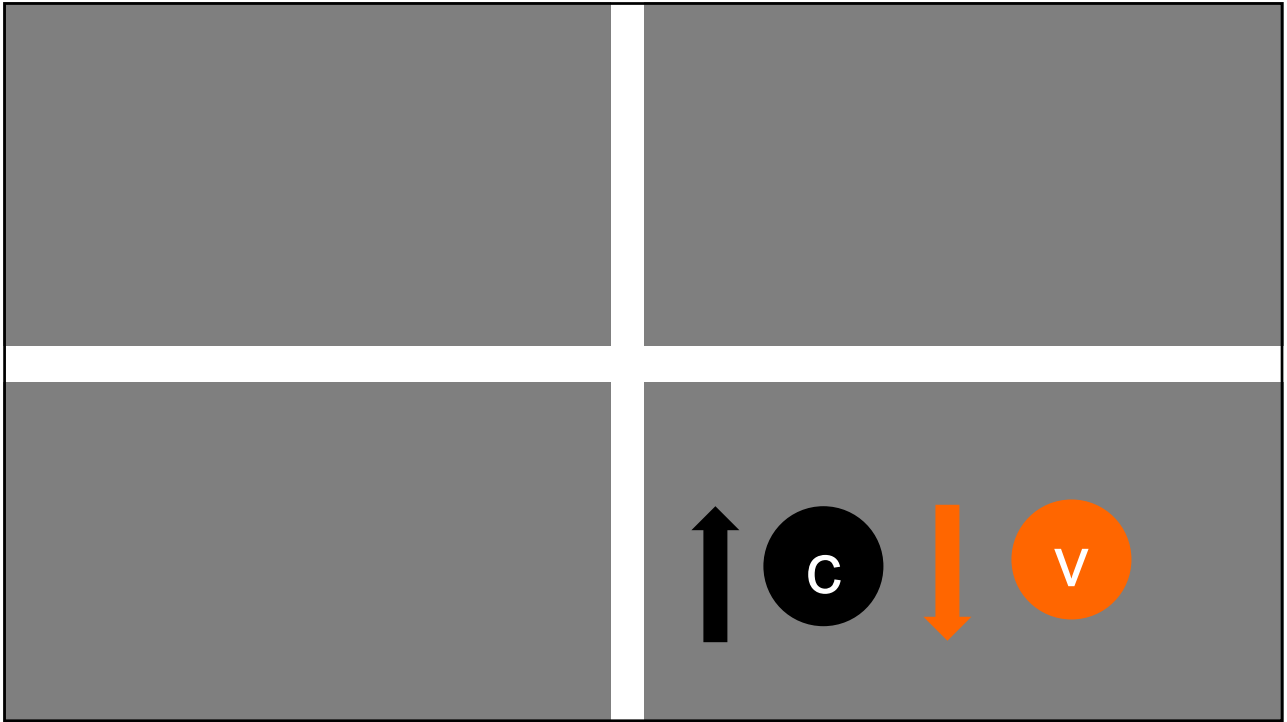
— *Simon Sinek* —



Let'S Start With

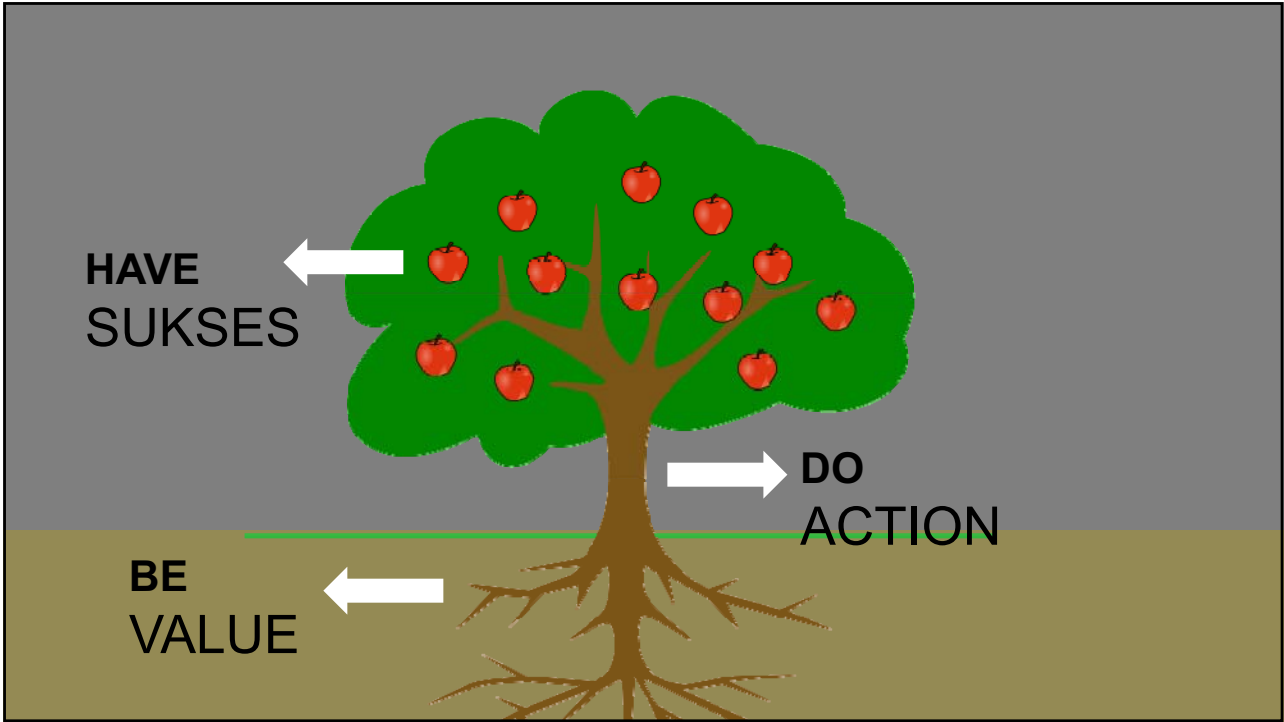
Why







Houtman Z. Arifin adalah mantan Vice President Citibank yang mengawali karirnya dengan menjadi OB (Office Boy) di bank tersebut.





FOTOCOPY SERTIFIKAT



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/581/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0028/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ISMAWAN SETYA HANDOKO, SE**
Jabatan : Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/582/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0029/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ARIF BUDI WALUYO, SE**

Jabatan : Wakil Ketua

Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/583/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0030/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **GURUH TRIADI PUTRA, S.Akun**
Jabatan : Wakil Ketua
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/584/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0031/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. EDY URWANTO**
Jabatan : **Wakil Ketua**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema "Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD" yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/585/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0033/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. SRI HARYATI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/586/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0034/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. DIDI SUNARYO**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/587/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0035/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ANWAR, ST**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/588/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0036/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **M. SOLAKHUDIN F**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/589/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0037/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. DIAH CATUR SRI NURNAENI**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karlita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/590/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0039/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MARNO**
Jabatan : **Anggota**
Instansi : **DPRD Kabupaten Banjarnegara**

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/591/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0040/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Dra. Hj. ISTIANATUN MINALLOH, MM**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/592/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0041/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **TUGIYO**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/593/BPSDM KEMENDAGRI

Nomor Universitas AKI : 0042/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. ERNAWATI LATHIFAH, SH**

Jabatan : Anggota

Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/594/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0043/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : KHUSNUL LATHOIF
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/595/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0044/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **BAMBANG SUPARNO**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/596/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0045/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SITI KOMARIAH**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/597/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0046/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ANA SUSANTO**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/598/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0047/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. NUR MUHAMMAD SALIM**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/599/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0048/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SLAMET**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/600/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0049/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MOCH. RACHMANUDIN**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/601/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0050/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SRI RAHAYU, SH**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/602/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0051/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SITI MUDRIATI, SH**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/603/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0052/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : REVI TENEL LIA, A.Md
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/604/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0053/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ENDI HARYANTO**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/605/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0054/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ARYA ACHMAD ZAKARIA, SH, MH**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/606/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0055/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **GALIH PAMUNGKAS**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/607/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0056/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Hj. LILIS UJIANTI, S.Ag, M.Pd**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/608/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0057/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **DIAN EKA WINARTININGSIH, SE**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/609/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0058/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. MUKH NURIN, S.Pd., MM**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/610/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0059/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **PUJO HARDIANSAH**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/611/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0060/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. DEDI SUROMLI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/612/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0061/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ACHMAD SALABI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/613/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0062/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **WASIS PUJIARTO**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/6/14/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0063/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **Drs. H. BAMBANG PRAWOTO. S**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/6/15/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0065/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **RYAN ADITYA WAHYU P, S.KM**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/616/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0066/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ISNAN RIJADI ACHMAD**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/617/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0067/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SLAMET RIYADI, S.Pd.I.**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/618/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0068/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **ACHMAD SRIYADI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/619/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0069/SF/BTK/REK/UNAKI//2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **DYAH WINDARTIM**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/620/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0070/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **AGUS JUNAIDI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/621/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0071/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **DJARKASI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/622/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0072/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **MUH. GURUH DA PAMUJI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/623/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0073/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **H. BAWONO, S.Sos, MM**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/624/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0074/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **UDANI PUJI LESTARI, S.Farm, Apt**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/625/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0075/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **BAMBANG PURNOMO ADI**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/626/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0076/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **NURUL IPTAK**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



UNIVERSITAS AKI

Sertifikat

Nomor Registrasi BPSDM : 893.3.33/627/BPSDM KEMENDAGRI
Nomor Universitas AKI : 0077/SF/BTK/REK/UNAKI/II/2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa :

Nama : **SLAMET SUNARYONO**
Jabatan : Anggota
Instansi : DPRD Kabupaten Banjarnegara

TELAH MENGIKUTI

Workshop dengan tema “Peran DPRD dalam Pembahasan LKPJ Kepala Daerah dan Mekanisme Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD” yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas AKI bekerjasama dengan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara, dari tanggal 02 sampai dengan 04 Februari 2024, bertempat di Hotel Grand Karilita Purwokerto - Banyumas.

Semarang, 03 Februari 2024
Rektor,



Dr. TRI PURWANI, SE., MM.
NIDN. 0609027101



DOKUMENTASI

**Dokumentasi Workshop
DPRD Kabupaten Banjarnegara
Hotel Grand Karlita - Purwokerto, 02 s.d 04 Februari 2024**

